

LAPORAN KINERJA

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG

2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG**

LAPORAN KINERJA

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG

2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG**

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2022

No. Publikasi: 16710.2301

Katalog: 1202059.1671

Ukuran Buku: 21 x 29.7 cm

Jumlah Halaman: viii + 111 Halaman/*Pages*

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Dicetak oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Palembang dalam pencapaian visi dan misi di tahun anggaran 2022. Laporan ini disusun sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengacu pada prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*. Laporan ini sebagai bentuk kepatuhan BPS Kota Palembang terhadap peraturan pemerintah, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Laporan Kinerja ini berisikan capaian kinerja selama tahun 2022, perkembangan capaian kinerja tahun 2022 terhadap 2021, capaian kinerja terhadap target Renstra 2020-2024, upaya efisiensi yang telah dilaksanakan serta kinerja anggaran BPS Kota Palembang selama tahun 2022. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, pimpinan Badan Pusat Statistik Kota Palembang mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini sangat kami hargai.

Palembang, 31 Januari 2023
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG



YUDHISTIRA ARYA NOEGRAHA



D A F T A R I S I

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
Daftar Lampiran		v
Ringkasan Eksekutif		vi
Bab I	Pendahuluan	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	3
	1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Palembang	4
	1.4 Wilayah Administrasi Kerja BPS Kota Palembang	6
	1.5 Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran	7
	1.6 Potensi dan Permasalahan	12
	1.7 Sistematika Penyajian Laporan	14
Bab II	Perencanaan Kinerja	
	2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS Kota Palembang	15
	2.2 Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Palembang 2020-2024	22
	2.3 Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Palembang Tahun 2022	24
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	
	3.1 Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2022	27
	3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang	49
	3.3 Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2020 - 2024	54
	3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	58
	3.5 Prestasi dan Inovasi BPS Kota Palembang Tahun 2022	60
	3.6 Kegiatan Prioritas BPS Kota Palembang 2022	65
	3.7 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2022	85
	3.8 Kinerja Anggaran Tahun 2022	91
Bab IV	Penutup	
	4.1 Tinjauan Umum	83
	4.2 Tindak lanjut	84
Lampiran-lampiran		
	1 Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Palembang 2020-2024	
	2 Perjanjian Kinerja 2022	
	3 Pengukuran Capaian Kinerja 2022	
	4 SDM BPS Kota Palembang	
	5 Kegiatan BPS Kota Palembang	
	6 Response Rate Survei 2022	
	7 Judul Publikasi	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Kinerja, Penyerapan Anggaran, dan Efisiensi berdasarkan Tujuan dan Sasaran	vii
Tabel 2.	Kecamatan di Kota Palembang	6
Tabel 3.	Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang	8
Tabel 4.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	9
Tabel 5.	Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang Menurut Usia Tahun 2022	9
Tabel 6.	Pagu Anggaran BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2022	9
Tabel 7.	Pernyataan Visi dan Misi BPS Kota Palembang 2020-2024	16
Tabel 8.	Tujuan dan Sasaran Strategis BPS 2020-2024	19
Tabel 9.	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Renstra BPS Kota Palembang 2020-2024	23
Tabel 10.	Reviu Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2022	25
Tabel 11.	Capaian Kinerja Tujuan Pertama BPS Kota Palembang Tahun 2022	28
Tabel 12.	Jumlah Pengunjung Website BPS Kota Palembang	31
Tabel 13.	Hasil Capaian Kinerja Tujuan Kedua BPS Kota Palembang Tahun 2022	34
Tabel 14.	Kegiatan Metadata Statistik Sektoral dan Khusus	38
Tabel 15.	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kota Palembang Tahun 2022	40
Tabel 16.	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Tahun 2022	43
Tabel 17.	Hasil Capaian Kinerja PK Suplemen Tahun 2022	48
Tabel 18.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2021-2022	50
Tabel 19.	Capaian Kinerja Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat Tahun 2017 - 2022	52
Tabel 20.	Persentase Kepuasan Pengguna Data Terhadap Sarana dan Prasarana Pelayanan BPS Selama Tahun 2018 - 2022	53
Tabel 21.	Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Rencana Strategis 2020 dan 2024	54
Tabel 22.	Jadwal Kegiatan <i>Long Form</i> Sensus Penduduk 2020	66
Tabel 23.	Alokasi Petugas <i>Long Form</i> SP2020 Kota Palembang per Kecamatan	67
Tabel 24.	Alokasi Jumlah Petugas Pendataan Awal Regsosek Menurut Kecamatan Kota Palembang	81
Tabel 25.	Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Program Tahun 2022	85

Tabel 26.	Penyerapan Anggaran BPS Kota Palembang Dirinci Menurut Jenis Belanja	86
Tabel 27.	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran BPS Kota Palembang Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2022	87
Tabel 28.	Efisiensi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran	88
Tabel 29.	Potensi Penghematan Tahun 2022	90
Tabel 30.	Konsistensi rencana penarikan dana dan penyerapan anggaran Tahun 2021 dan 2022	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	SDM BPS Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022	8
Gambar 2.	Pagu Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2022	22
Gambar 3.	Persentase Konsumen di PST BPS Kota Palembang yang Berasal dari K/L/OPD Menggunakan Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Nasional	30
Gambar 4.	Publikasi BPS Kota Palembang yang Menerapkan Standar Akurasi	33
Gambar 5.	Penyelenggaraan Rekomendasi Statistik Kota Palembang Tahun 2022	36
Gambar 6.	Daftar Pelaporan Metadata Statistik Kota Palembang Tahun 2022	39
Gambar 7.	Persentase Kepuasan Pengguna Data Terhadap Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan BPS	47
Gambar 8.	Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2015-2022	51
Gambar 9.	Capaian Kinerja Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat BPS Kota Palembang Tahun 2017-2022	52
Gambar 10.	Persentase Kepuasan Pengguna Data Terhadap Sarana dan Prasarana Pelayanan BPS	53
Gambar 11.	Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Rencana Strategis 2022 dan 2024	55
Gambar 12.	Piagam Penghargaan Sebagai Satuan Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Berdasarkan Hasil Tes Penilai Internal 2022	60
Gambar 13.	Hasil Penilaian <i>Desk Evaluation</i> Implementasi SAKIP Tahun 2022 Inspektorat Wilayah I	61
Gambar 14.	Piagam Penghargaan Sebagai Kabupaten/Kota Terbaik Kedua	61
Gambar 15.	Piagam Penghargaan Pengelolaan <i>Website</i> Terbaik	62
Gambar 16.	Piagam Penghargaan Peringkat Kedua Penyedia Data Nerwilis Ter-Cetar (Cepat, Tepat, dan Akurat)	62
Gambar 17.	Piagam Penghargaan Peringkat Keempat Producer Terbaik Tahun 2021	62
Gambar 18.	Juara 3 <i>Agriculture Room</i> Terbaik	63
Gambar 19.	Terbaik Pertama UMK Awards	63
Gambar 20.	Pojok Statistik di Mall Pelayanan Publik Kota Palembang	64
Gambar 21.	Tahapan Rekrutmen Petugas <i>Long Form</i> Sensus Penduduk 2020	68
Gambar 22.	Dokumentasi Pelatihan Petugas <i>Long Form</i> SP2020	69
Gambar 23.	Dokumentasi Pemutakhiran Rumah Tangga <i>Long Form</i> SP2020	70
Gambar 24.	Skema Pendataan SP2020-C2 Wilayah CAPI	71

Gambar 25.	Dokumentasi Pencacahan Rumah Tangga <i>Long Form</i> SP2020	73
Gambar 26.	Dokumentasi Pengawasan dan Supervisi Pencacahan Rumah Tangga <i>Long Form</i> SP2020	75
Gambar 27.	Monitoring Melalui Dashboard dan Pelaporan Telegram <i>Long Form</i> SP2020	76
Gambar 28.	Dokumentasi Pelatihan Calon Petugas Pendataan	82
Gambar 29.	Dokumentasi Pendataan Lapangan Regsosek 2022	83
Gambar 30.	Dokumentasi Monitoring Kualitas Regsosek 2022	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Reviu Rencana Strategis BPS Kota Palembang 2020-2024	98
Lampiran 2	: Perjanjian Kinerja (PK) 2022	99
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja (PK) Suplemen 2022	102
Lampiran 4	: Pengukuran Capaian Kinerja BPS Kota Palembang 2022	103
Lampiran 5	: Sumber Daya Manusia BPS Kota Palembang Menurut Unit Organisasi dan Jenjang Pendidikan Tahun 2022	104
Lampiran 6	: Kegiatan BPS Kota Palembang 2022	105
Lampiran 7	: Response Rate Survei BPS Kota Palembang	108
Lampiran 8	: Jumlah Publikasi BPS Kota Palembang	110



RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi BPS yaitu “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” (“*Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia*”) merupakan harapan dan tekad BPS Kota Palembang. Keinginan pengguna data baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa BPS Kota Palembang kedepan harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis, penataan organisasi, tata laksana penyediaan data dan informasi, yang didukung SDM profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kota Palembang yang mengarahkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai tugas pokok. Misi BPS Kota Palembang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi, maka BPS Kota Palembang memiliki tujuan. Tujuan yang ditetapkan juga mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya. BPS Kota Palembang memiliki empat tujuan yang dicanangkan dalam Rencana Strategis periode 2020-2024, yaitu:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan,



2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN,
3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Tabel 1. Capaian Kinerja, Penyerapan Anggaran, dan Efisiensi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	100	99,45	0,55
	1.1 Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	100	99,45	0,55
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	110	99,85	9,23
	2.1 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	110	99,85	9,23
3	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	108,33	99,94	7,74
	3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	108,33	99,94	7,74
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	99,97	99,77	0,20
	4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	99,97	99,77	0,20
	Rata-Rata	104,04	99,53	4,33

Pada Tahun 2022 BPS Kota Palembang mendapat anggaran sebesar Rp29.871.044.000,- yang terdiri :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS sebesar Rp7.362.448.000,- , dengan penyerapan anggaran 99,77 persen

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp 22.508.596.000,- , dengan penyerapan anggaran 99,45 persen

Apabila dilihat dari capaian kinerja selama tahun 2022 terlihat bahwa BPS Kota Palembang telah berhasil mencapai tujuannya. Kesimpulan ini tercermin dari rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 104,04 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Kota Palembang berjalan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari efisiensi BPS Kota Palembang sebesar 4,33 persen dan penyerapan anggaran 99,53 persen.

Pada tujuan pertama "Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan" penyerapan anggaran sebesar 99,45 persen terdapat efisiensi sebesar 0,55 persen dengan nilai capaian kinerja 100 persen. Tujuan kedua "Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN" yaitu pengumpulan survey kebutuhan data dan metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus telah selesai dilakukan. Penyerapan anggarannya sebesar 99,85 persen.

Penyerapan anggaran tujuan ketiga "Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN" yaitu sebesar 99,94 persen dengan capaian kinerja 108,33 persen dan efisiensi sebesar 7,74 persen. Sedangkan penyerapan pada tujuan keempat "Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi" sebesar 99,77 persen dengan capaian kinerja 99,97 persen dan efisiensi 0,20 persen.

Inovasi yang dibangun oleh BPS Kota Palembang sangat membantu pencapaian tujuan dimaksud. Bagi pemerintah atau OPD WhatsApp Bot bermanfaat mempersingkat waktu untuk mendapatkan informasi statistik terkini dan akses lebih mudah dan lebih cepat dalam melakukan konsultasi statistik sehingga dapat mereka gunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.



BAB I. PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik mengamanatkan BPS bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyedia data atau informasi sekaligus sebagai koordinator perstatistikan di Indonesia. Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh BPS dengan instansi pemerintah, lembaga penelitian, atau masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada tahun 2022 BPS Kota Palembang melaksanakan 4 kegiatan prioritas nasional yaitu *Long form* Sensus Penduduk 2020, Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi, Survei *E-Commerce*, dan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2020 (SP 2020) yang telah dilaksanakan pada bulan September tahun 2020, BPS melaksanakan Sensus Penduduk *Long Form* (SPLF) pada bulan Agustus dan September Tahun 2022. Sebelum pelaksanaan SPLF, pada tahun 2021 dilakukan kegiatan pra-pemutakhiran untuk memberikan gambaran kondisi lapangan sehingga pelaksanaan SPLF pada tahun 2022 nantinya dapat berjalan lancar dan tanpa kendala, terutama di tengah pandemi Covid-19 yang tidak menentu.

Selain kegiatan Sensus Penduduk Lanjutan, BPS Kota Palembang juga pada tahun 2022 kembali melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan BPS Kota Palembang dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pada tahun ini BPS Kota Palembang masuk sebagai salah satu dari 60 satuan kerja yang ditetapkan oleh BPS RI sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2022.

Selain itu, BPS selalu berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna data dalam memproduksi dan menyajikan data statistik. Hal tersebut merupakan suatu keharusan sebagai lembaga publik penyedia data dan informasi statistik sekaligus sebagai wujud tanggung jawab dan amanat pemerintah yang diemban. Melalui *Advance Release*



Calendar (ARC) terangkum publikasi dan berita resmi statistik yang akan terbit pada tahun yang bersangkutan. ARC tersebut disajikan pada *website* BPS Kota Palembang. Publikasi yang diterbitkan di *website* BPS Kota Palembang yaitu Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2022, Statistik Ketenagakerjaan Kota Palembang 2021, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang tahun 2022, Kecamatan Dalam Angka Tahun 2022, Statistik Daerah Kota Palembang, Kota Palembang Dalam Angka 2022, PDRB Kota Palembang menurut Lapangan Usaha 2017-2021, dan PDRB Kota Palembang menurut pengeluaran Tahun 2017-2021. Dan wujud dari kerja keras dan kerja cerdas Tim BPS Kota Palembang, pada Rakorda Tahun 2022 memperoleh beberapa penghargaan dari BPS Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya Kinerja Terbaik Kedua BPS Kabupaten/Kota dan satker dengan predikat pengelolaan website terbaik di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk memberikan arah tahunan bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan, BPS Kota Palembang telah pula menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, sasaran, program serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan organisasi BPS Pusat yang dilaksanakan setiap tahun. Pada awal tahun BPS Kota Palembang telah menyusun Perjanjian Kinerja. Target kinerja yang telah ditetapkan diukur capaiannya dan dipantau secara periodik setiap bulan, triwulanan dan tahunan. Pada akhir tahun dapat diketahui hasil akhir pencapaian target dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tahunan wajib disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga. Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 yang menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran BPS akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan. Laporan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas BPS sebagai penyelenggara negara dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk tahun mendatang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala BPS Kota Palembang kepada Pemerintah atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan diawal tahun 2022, disamping itu juga bertujuan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:


- 1) Mengevaluasi capaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPS Kota Palembang
- 2) Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas BPS Kota Palembang sebagai instansi yang mempertahankan dan meningkatkan pelayanan serta kepercayaan dari masyarakat;
- 3) Umpan balik peningkatan kinerja aparatur BPS Kota Palembang dalam perbaikan manajemen kinerja secara benar, nyata dan bertanggung jawab;
- 4) Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Statistik Kota Palembang
- 5) Mendorong transparansi dan penyelenggaraan kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun secara berkesinambungan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendorong Instansi fokus pada pencapaian sasaran. Dalam upaya pencapaian sasaran perlu sebuah alat ukur yang dinamakan Indikator Kinerja. Indikator kinerja berupa :

1. Hasil (*Outcome*): Bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan output (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan
2. Keluaran (*Output*): Bagaimana produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya kebijakan atau program, berdasarkan input (masukan) yang digunakan.

Standar bagi dasar melakukan Evaluasi Kinerja adalah:

1. Ketaatan (*compliance*) berkaitan dengan upaya audit, dengan mempertanyakan sejauh mana transaksi oleh pemerintah yang dalam hal ini, BPS Kota Palembang, apakah telah sejalan atau sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang- undangan;

- 
2. Efisiensi (*efficiency*) berkaitan dengan sejauh mana instansi pemerintah, yang dalam hal ini BPS Kota Palembang, telah mencapai tingkat produktivitas optimum atas dasar sumber daya yang telah digunakan;
 3. Efektivitas (*Effectiveness*) berkaitan dengan sejauh mana tingkat pencapaian tujuan kebijakan atas dasar pemanfaatan sumber daya publik.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Palembang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konstitusional BPS yang menyatakan tentang kedudukan dan kewenangannya. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. BPS sedang berada dalam masa transisi, mendukung kebijakan pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi, mengurangi tingkat eselon untuk kemudian dialihkan ke jabatan yang bersifat fungsional secara bertahap. Menggunakan dasar hukum Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, dan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, pada masa transisi ini. Mengingat Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 baru ditetapkan pada 17 Desember 2020.

Kedudukan BPS Kota Palembang adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. BPS Kota Palembang dipimpin oleh seorang Kepala. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi.

1. Tugas

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, Bab III Bagian Kesatu pasal 10 disebutkan bahwa BPS Kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.



2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota Palembang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan statistik dasar di Kota Palembang.
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Palembang.
3. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kota Palembang.
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kota Palembang.

3. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kota Palembang, yaitu :

1. Kepala

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang mempunyai tugas memimpin BPS Kota Palembang sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kota Palembang serta membina aparatur BPS agar berdaya guna dan berhasil guna.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga.

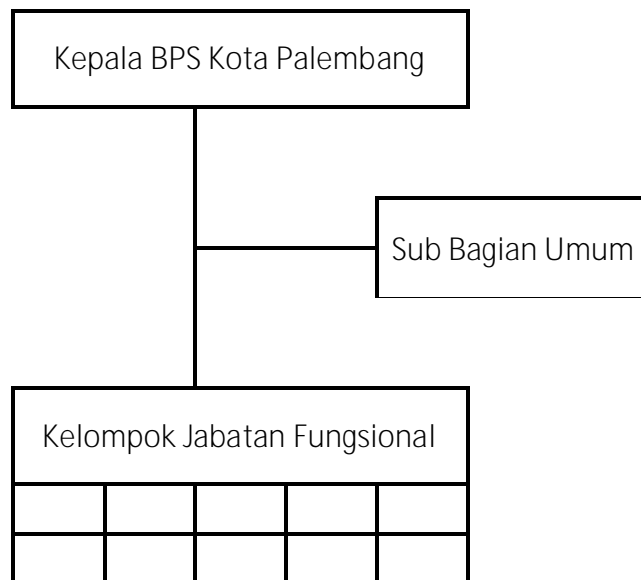
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi dan BPS Kota Palembang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BPS Kota Palembang.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Secara rinci bagan organisasi BPS Kota Palembang:



1.4. Wilayah Administrasi Kerja BPS Kota Palembang

Wilayah administrasi kerja BPS Kota Palembang yang menjadi tanggung jawab pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yaitu 18 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Kecamatan di Kota Palembang

No	Kode	Kecamatan
1.	010	Ilir Barat Dua
2.	011	Gandus
3.	020	Seberang Ulu Satu
4.	021	Kertapati
5.	022	Jakabaring
6.	030	Seberang Ulu Dua
7.	031	Plaju
8.	040	Ilir Barat Satu
9.	041	Bukitkecil
10.	050	Ilir Timur Satu
11.	051	Kemuning
12.	060	Ilir Timur Dua

13.	061	Kalidoni
14.	062	Ilir Timur Tiga
15.	070	Sako
16.	071	Sematangborang
17.	080	Sukarami
18.	081	Alang-Alang Lebar

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik Kota Palembang dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu:

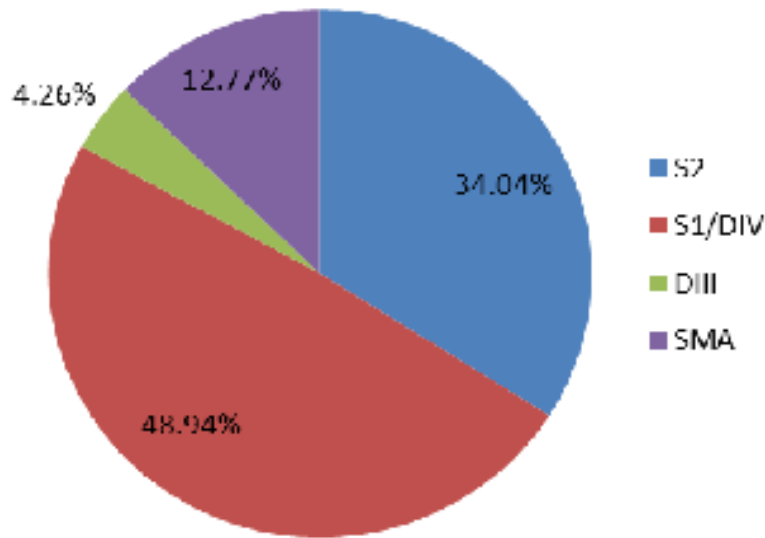
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

1.5. Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran

Sumber daya manusia adalah salah satu asset organisasi yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kinerja dalam rangka mencapai tujuan. Kondisi ASN di lingkungan BPS Kota Palembang sampai dengan akhir tahun 2022 berjumlah 47 orang yang terdiri dari 16 orang yang berpendidikan S2, 23 orang pegawai berpendidikan S1/D-IV, 2 orang pegawai yang berpendidikan D-3 dan 6 orang yang berpendidikan SMA. Dari gambaran ini, dapat diperoleh informasi bahwa komposisi pendidikan ASN di BPS Kota Palembang didominasi oleh lulusan S1/D-IV sebanyak 48,94 persen dan lulusan S2 sebanyak 34,04 persen. Sedangkan untuk pegawai berpendidikan SMA hanya sebesar 12,77 persen dari total pegawai BPS Kota Palembang. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan kinerja suatu instansi.



Gambar 1. SDM BPS Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022



Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, terdapat perubahan susunan organisasi di BPS Kota Palembang menjadi 2 pejabat struktural yang terdiri dari Eselon III (Kepala) dan Eselon IV (Kasubbag Umum), serta Kelompok Jabatan Fungsional. Komposisi pegawai BPS Kota Palembang menurut jabatan sebagai berikut :

Tabel 3. Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang

Jabatan	Jumlah (Orang)	Jenis Kelamin			
		Lk	%	Pr	%
1. Pejabat Struktural	2	2	4,26	0	0,00
2. Pejabat Fungsional Tertentu	26	9	19,15	17	36,17
3. Pejabat Fungsional Umum	19	6	12,77	13	27,66
Jumlah	47	17	36,17	30	63,83

Berdasarkan Peraturan Kepala (PERKA) BPS Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui Penyesuaian/Inpassing, pada tahun 2022 terdapat 2 pegawai yang mengikuti ujian kompetensi statistisi dan dinyatakan lulus. Selain itu, terdapat mutasi masuk 2 fungsional tertentu, yaitu 1 fungsional statistisi dan 1 fungsional pranata komputer. Sehingga pada

Tahun 2022 pegawai yang menduduki jabatan fungsional sebanyak 26 orang atau 55,32 persen dari seluruh pegawai yang terdiri dari 1 orang Statistisi Madya, 12 orang Statistisi Ahli Muda, 2 orang Pranata Komputer Ahli Muda, 9 orang Statistisi Pertama, 1 orang Penyelia, dan 1 orang Statistisi Pelaksana Lanjutan.

Tabel 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
IV	8	17,02
III	35	74,47
II	4	8,51
Jumlah	47	100,00


Tabel 5. Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang Menurut Usia Tahun 2022

Usia	Jumlah (orang)	Persentase
>50	10	21,28
41-50	12	25,53
31-40	19	40,43
30	6	12,77
Jumlah	47	100,00

Pada tahun 2022, awalnya BPS Kota Palembang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp12.866.317.000,-, lalu mendapat penambahan anggaran di pertengahan tahun dikarenakan adanya penambahan kegiatan menjadi sebesar Rp 29.871.044.000,-. Pagu tersebut dibagi ke dalam program teknis yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp 22.508.596.000,- dan Program Dukungan Manajemen (Dukman) sebesar Rp 7.362.448.000,-. Rincian Pagu anggaran BPS Kota Palembang tahun 2022 menurut program dan sumber dana dapat dilihat pada Tabel 6.


Tabel 6. Pagu Anggaran BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2022


Program	Hibah	PNBP	Rupiah Murni	Total
Dukungan Manajemen	-	-	7.362.448.000	7.362.448.000
PPIS	-	-	22.508.596.000	22.508.596.000
Total	-	-	29.871.044.000	29.871.044.000



BPS Kota Palembang telah melakukan revisi DIPA (dengan pengesahan DJA) sebanyak 16 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Revisi pertama dilakukan secara terpusat oleh BPS RI Nomor: S-458/01000/PR.440/12/2021 tanggal 8 Desember 2021, pengesahan revisi pada tanggal 15 Desember 2021. Revisi pertama dilakukan dalam rangka pencadangan anggaran tahun 2022. Pagu Semula Rp 12.866.317.000 menjadi Rp 12.178.383.000.
- 2) Revisi kedua dilakukan oleh BPS Kota Palembang Nomor : B-064/16710/PR.450/01/2022 tanggal 19 Januari 2022, pengesahan revisi pada tanggal 21 Januari 2022. Revisi kedua dilakukan dalam rangka Pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan. Pagu tetap Rp 12.178.383.000.
- 3) Revisi ketiga dilakukan secara terpusat oleh BPS RI Nomor: B-018/01000/PR.400/01/2022 tanggal 9 Februari 2022, pengesahan revisi pada tanggal 9 Februari 2022. Revisi ketiga dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun anggaran 2022. Pagu Semula Rp 12.178.383.000 menjadi Rp13.352.080.000.
- 4) Revisi keempat dilakukan oleh BPS Kota Palembang Nomor: B-186/16710/PR.450/04/2022 tanggal 13 April 2022, pengesahan revisi pada tanggal 14 April 2022. Revisi keempat dilakukan dalam rangka revisi administrasi dan revisi POK terkait dengan perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA. Pagu tetap Rp13.352.080.000.
- 5) Revisi kelima dilakukan secara terpusat oleh BPS RI Nomor: B-258/02000/PR.440/04/2022 pengesahan revisi pada tanggal 27 Mei 2022, pengesahan revisi pada tanggal 27 Mei 2022. Revisi kelima dilakukan dalam rangka penyesuaian pelaksanaan kegiatan BPS Tahun Anggaran 2022 yakni terkait perubahan alokasi sampel dan teknis pelaksanaan program PPIS dan realokasi anggaran pada program DMTTL. Pagu Semula Rp13.352.080.000 menjadi Rp 13.551.306.000.
- 6) Revisi keenam dilakukan secara terpusat oleh BPS RI Nomor: B-186/01000/PR.440/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, pengesahan revisi pada tanggal 15 Juni 2022. Revisi keenam dilakukan dalam rangka penambahan *Automatic Adjustment* Belanja TA 2022 untuk menindak lanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022. Pagu tetap Rp13.551.306.000.

- 
- 7) Revisi ketujuh dilakukan oleh BPS Kota Palembang Nomor: B-286/16710/PR.450/07/2022 tanggal 5 Juli 2022, pengesahan revisi pada tanggal 5 Juli 2022. Revisi ketujuh dilakukan dalam rangka revisi administrasi dan revisi POK terkait dengan perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA.
 - 8) Revisi kedelapan dilakukan secara terpusat berdasarkan surat Sestama BPS RI Nomor B-501/02000/PR.440/07/2022 tanggal 22 Juli 2022, pengesahan revisi tanggal 11 Agustus 2022 yang dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan Tahun 2022. Pagu Semula Rp13.551.306.000 menjadi Rp 14.294.568.000.
 - 9) Revisi kesembilan dilakukan secara terpusat berdasarkan surat Sestama BPS RI Nomor B-585/02000/PR.440/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022, pengesahan revisi tanggal 25 Agustus 2022 yang dilakukan dalam rangka dasar hitung pendataan awal regsosek Tahun 2022. Pagu Semula Rp 14.294.568.000 menjadi Rp 30.136.684.000.
 - 10) Revisi kesepuluh dilakukan secara terpusat berdasarkan surat Sestama BPS RI Nomor B-603/02000/PR.440/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, pengesahan revisi tanggal 29 Agustus 2022 yang dilakukan dalam rangka revisi DIPA pembukaan blokir anggaran pendataan awal regsosek Tahun 2022. Pagu tetap Rp 30.136.684.000.
 - 11) Revisi kesebelas dilakukan oleh BPS Kota Palembang Nomor: B-376/16710/PR.450/09/2022 tanggal 14 September 2022, pengesahan revisi pada tanggal 15 September 2022. Revisi ketujuh dilakukan dalam rangka revisi administrasi dan revisi POK.
 - 12) Revisi kedua belas dilakukan berdasarkan surat Sestama BPS RI Nomor B-731/02000/PR.440/09/2022 tanggal 30 September 2022, pengesahan revisi tanggal 20 Oktober 2022. Pagu Semula Rp 30.136.684.000 menjadi Rp 30.570.162.000.
 - 13) Revisi ketiga belas dilakukan oleh BPS Kota Palembang Nomor: B-474/16710/PR.450/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022, pengesahan revisi pada tanggal 28 Oktober 2022. Revisi ketujuh dilakukan dalam rangka revisi administrasi dan revisi POK.
 - 14) Revisi keempat belas dilakukan oleh BPS Kota Palembang Nomor B-507/16710/PR.700/08/2022 tanggal 21 November 2022, pengesahan revisi tanggal 24 November 2022. Revisi yang dilakukan dalam rangka revisi antar satker dan revisi administrasi. Pagu semula Rp 30.570.162.000 menjadi Rp 30.642.162.000.

- 
- 15) Revisi kelima belas dilakukan berdasarkan surat Sestama BPS RI Nomor B-988/02000/PR.440/11/2022 tanggal 24 November 2022, pengesahan revisi tanggal 12 Desember 2022. Revisi anggaran dalam rangka realokasi *Automatic Adjustment*. Pagu Semula Rp 30.642.162.000 menjadi Rp 29.871.044,000.
 - 16) Revisi keenambelas dilakukan oleh BPS Kota Palembang Nomor B-559/16710/PR.700/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, pengesahan revisi tanggal 15 Desember 2022. Revisi dilakukan dalam rangka revisi pemutakhiran POK.

1.6. Potensi dan Permasalahan


Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan badan pelayanan publik yang memberikan pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Data yang berkualitas sangat membantu Pemerintah dalam menghasilkan keputusan/kebijakan yang tepat. Peranan data statistik sangat penting dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional maupun daerah.

Penyebarluasan data BPS kepada masyarakat menjadi sorotan utama pihak luar, baik oleh sesama instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Oleh sebab itu, penyajian dan penyebarluasan data perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Pintu gerbang penyebarluasan data BPS adalah Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Melalui PST konsumen data (mahasiswa, peneliti, pemerintah, masyarakat, pelajar, dan lain-lain) dapat memperoleh data yang diperlukan baik untuk skripsi, tugas sekolah dan kuliah, untuk pengambilan kebijakan pemerintah, dan sebagainya.

Adapun potensi yang dimiliki BPS Kota Palembang yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, antara lain:

Tersedianya 47 pegawai dengan kualifikasi pendidikan hampir 90 persen lulusan perguruan tinggi.

Tersedianya peralatan dan perlengkapan pengolahan dan diseminasi data yang berbasis TIK (teknologi informasi dan komunikasi)



Tersedianya anggaran pemeliharaan dapat dimaksimalkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, sehingga dapat mendukung kenyamanan pegawai dan pengguna data

Dukungan dari Pemerintah Kota Palembang dalam setiap kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan di lapangan.

Menjawab harapan dan tuntutan terhadap data yang berkualitas menjadi tantangan untuk meningkatkan peran BPS Kota Palembang sebagai badan penyedia data yang berkualitas dan terpercaya bagi semua pihak. Tantangan yang dihadapi tahun 2022 ini sangat berat bagi BPS dikarenakan kondisi pandemi covid 19. Dengan adanya PPKM, penerapan protokol kesehatan, tentunya pengumpulan data lewat wawancara langsung menemui kendala, petugas BPS juga harus menaati setiap protokol kesehatan, sedangkan responden menjadi lebih hati-hati saat dimintai keterangan sehingga pengumpulan data menjadi agak terganggu. Selain itu, tantangan perubahan yang dihadapi BPS Kota Palembang antara lain:

1. Tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah terhadap ragam dan kualitas data statistik semakin meningkat.
2. Proses bisnis survei-survei belum terencana dengan baik, dimana jadwal survei yang sifatnya tahunan sering menumpuk dalam 1 waktu, sehingga terkendala dalam penyiapan SDM dan persiapan lapangan lainnya.
3. Belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS
5. Ada kecenderungan masyarakat enggan dan menolak untuk menjadi responden BPS terutama untuk masyarakat yang tinggal di kawasan elit.
6. Rendahnya kesadaran responden dalam memberikan informasi dengan benar, menyebabkan kualitas data dan response rate rendah.
7. Koordinasi antara BPS Kota Palembang dengan instansi lain masih perlu ditingkatkan supaya peran BPS sebagai pembina statistik sektoral akan semakin baik.
8. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak kegiatan sensus/survey dilakukan tidak dengan wawancara langsung dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara online, berdampak pada kualitas data yang dihasilkan.

1.7. Sistematika Penyajian Laporan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang selama Tahun 2022. Capaian Kinerja Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) 2022 dan Rencana Strategis 2020-2024 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi; wilayah administrasi; sumber daya manusia di BPS Kota Palembang; potensi dan permasalahan yang dihadapi; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran BPS Kota Palembang yang meliputi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang yang terdiri dari Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2022; Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang tahun 2022 terhadap tahun 2021 dan target Renstra 2020-2024; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; upaya efisiensi dan kinerja anggaran 2022; serta *reward* dan *punishment*.

Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2022 dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS Kota Palembang

Visi

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti:

1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil;
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi;
3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS Kota Palembang untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025, yaitu "Mewujudkan bangsa yang berdaya saing" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Berdasarkan misi pembangunan nasional tersebut BPS Kota Palembang menetapkan visi tahun 2020-2024 yang mengacu pada Visi BPS RI, yaitu:

*"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju"
(Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia)*

Dalam visi tersebut berarti BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik

berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kota Palembang yang mengarahkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai tugas pokok. Misi BPS Kota Palembang dirumuskan sebagai berikut pada Tabel 7:

Tabel 7. Pernyataan Visi dan Misi BPS Kota Palembang 2020-2024

VISI BPS KOTA PALEMBANG 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju di BPS Kota Palembang	MISI BPS KOTA PALEMBANG 2021 – 2024
		1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah

Misi BPS Kota Palembang tahun 2020-2024 mengandung arti:

- 1) Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.

Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009:187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi :

1. *Relevance* (relevansi)
2. *Accuracy* (akurasi)
3. *Timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu)
4. *Acessibility* (aksesibilitas)



5. *Coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan)

6. *Interpretability* (interpretabilitas)

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS Kota Palembang akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.


Tujuan utama dalam pelayanan prima adalah kepuasan masyarakat. Parasuraman (2001) menyatakan bahwa terdapat lima unsur penting yang menentukan kepuasan yaitu *responsiveness*, *assurance*, *tangible*, *empathy*, dan *reliability*. BPS Kota Palembang telah mengadakan Survei Kebutuhan Data untuk mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik, serta memberikan pelayanan yang baik.

4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik harus terus dilakukan.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi, maka BPS Kota Palembang memiliki tujuan. Tujuan dalam Rencana Strategis BPS Kota Palembang adalah suatu keadaan yang



akan dicapai atau dihasilkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang ditetapkan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya. Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. BPS Kota Palembang memiliki empat tujuan yang dicanangkan dalam Rencana Strategis periode 2020 sampai 2024. Tujuan BPS Kota Palembang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut.

Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Mencakup dua indikator kinerja yang ditetapkan, yaitu :

1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN

Sasaran Strategis 2: Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Mencakup dua indikator kinerja yang ditetapkan, yaitu :

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar

Tujuan 3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Sasaran Strategis 3: Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I

Mencakup satu indikator kinerja yang ditetapkan, yaitu :

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapatkan pembinaan statistik

Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Sasaran Strategis 4 : SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Mencakup dua indikator kinerja yang ditetapkan, yaitu :

1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis
T.1 Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
T.2 Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS2.1 Meningkatnya penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
T.3 Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3.1 Meningkatnya penguatan statistik sektoral K/L/D/I
T.4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4.1 Meningkatnya SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan


Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya, BPS Kota Palembang menetapkan arah kebijakan seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024 sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu



menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur utama adalah BPS mampu menjadi *strategic enabler* dan *decision support system (DSS)*.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastuktur di BPS

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru
2. Meningkatnya layanan statistik melalui *multichannel dissemination*
3. Meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar
4. Meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan *Smart Office*


Sejak tahun 2020 program yang dilaksanakan BPS Kota Palembang mencakup 2 program yang meliputi:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) merupakan program generik
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) merupakan program teknis

Penyederhanaan program dimaksudkan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan. Program PSPA dimasukkan dalam program DMPTTL dalam output Layanan Sarana dan Prasarana Internal.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kota Palembang, yang terdiri dari output sebagai berikut :

1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
3. Layanan Perkantoran



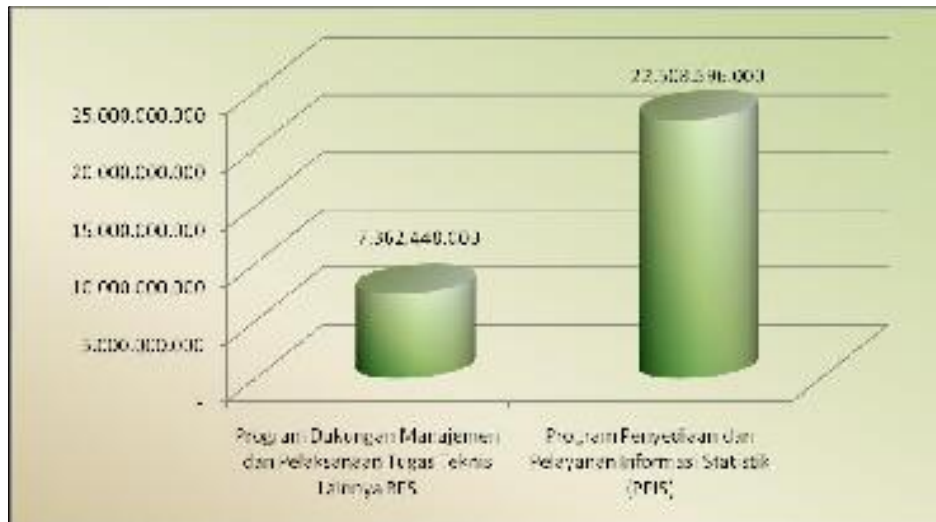
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS Kota Palembang secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2022 adalah penyediaan dan pelayanan informasi statistik yang komponennya sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional
2. Diseminasi dan Metadata Statistik
3. Statistik Neraca Pengeluaran
4. Statistik Neraca Produksi
5. Metropolitan Statistical Area
6. Statistik Distribusi yang Terbit Tepat Waktu
7. Statistik Harga
8. Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi
9. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
10. Sensus Penduduk (Sensus Sampel)
11. Penyusunan Integrasi Data Spasial Wilkerstat dan Muatan Hasil SP2020
12. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
13. Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)
14. Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK)
15. Pendataan Potensi Desa (Podes)
16. Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Terbit Tepat Waktu
17. Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Terbit Tepat Waktu
18. Statistik Hortikultura dan Perkebunan
19. Statistik Tanaman Pangan
20. Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut BPS Kota Palembang mendapat anggaran sebesar Rp 12.866.317.000,- dan direvisi menjadi Rp 29.871.044.000,-, yang terdiri Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS sebesar

Rp 7.362.448.000,- dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp 22.508.596.000,- .

Gambar 2. Pagu Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2022



2.2. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Palembang 2020-2024

Rencana strategis (Renstra) BPS Kota Palembang 2020-2024 mengacu kepada Renstra BPS 2020-2024. Penyusunan Renstra BPS 2020-2024 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Muatan Renstra BPS meliputi visi, misi, tujuan, dan strategi BPS yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPS dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Masing-masing tujuan dan sasaran strategis memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Kota Palembang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Renstra
BPS Kota Palembang 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan						
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	58,28	60	100	100	100
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	3,84	4	100	100	100
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN						
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	33,33	33,33	41	53	61
Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)		10	69,3	76	84	84	
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN						
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	2,5	5	92	96	96
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi						
	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	69	70	70	70	71
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)		80	100	100	99,6	99,7	

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Palembang Tahun 2022

Reformasi birokrasi di Indonesia intinya adalah melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik ditandai antara lain dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik tentunya diperlukan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik. Sistem pengukuran kinerja ini akan mengintegrasikan proses peningkatan kinerja melalui tahap perencanaan sampai dengan evaluasi capaiannya. Sistem pengukuran kinerja yang baik bermanfaat untuk berbagai hal, diantaranya dapat digunakan untuk menerapkan sistem *reward and punishment*, mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis program dan kegiatan, meningkatkan kinerja, dan lain-lain.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Dalam kurun waktu 2020-2024 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, kendala, maupun tantangan yang mungkin terjadi, BPS Kota Palembang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pembinaan kepada seluruh unit organisasi di BPS Kota Palembang.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju. Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan

atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di bidang informasi (termasuk informasi statistik) mengharuskan Pemerintah menyajikan informasi yang objektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, BPS Kota Palembang perlu menyusun suatu perencanaan strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya *good government* dan *clean government* tersebut.

Pada awal tahun 2022 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi BPS Kota Palembang yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut ditampilkan Reviu Perjanjian Kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kota Palembang, yang disusun dengan didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Target yang dicanangkan menjadi tolak ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun 2022.

Tabel 10. Reviu Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	100
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	41
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	76
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			



Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	92
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Point	70
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	100

Pada awal tahun 2022 juga ditetapkan perjanjian kinerja (PK) Suplemen yang terdiri dari tujuh indikator kinerja sasaran, yaitu:

1. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu
2. Tersedianya Layanan Pojok Statistik
3. Jumlah Desa Cinta Statistik (Cantik)
4. Satker berpredikat WBK WBBM dari KemenpanRB
5. Persentase pelaporan dokumen melalui SPI online
6. Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN/LHKASN
7. Terselenggaranya pengukuran Indeks Pembangunan Statistik

Sebagai perwakilan BPS RI di daerah, BPS Kota Palembang fokus menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, dengan kata lain kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indikator kinerja semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai dimensi data dan informasi yang berkualitas demi mendukung visi BPS sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju.



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Untuk mendukung pelaksanaan sistem pengukuran kinerja, pemerintah telah membuat sistem pengukuran kinerja dengan nama sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil monitoring capaian kinerja digunakan untuk melakukan tindakan korektif dalam pencapaian kinerja. Dengan demikian diharapkan kendala yang ditemui dalam pencapaian tujuan dan sasaran BPS Kota Palembang dapat diantisipasi lebih awal.

3.1. Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2022

Capaian kinerja BPS Kota Palembang 2022 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategi selama tahun 2022. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja yang dimaksud merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki target pada Perjanjian Kinerja 2022 dan data realisasinya dapat diperoleh.

Ada 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai BPS Kota Palembang pada tahun 2022, yaitu:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Secara keseluruhan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang tahun 2022 menunjukkan keberhasilan yang signifikan dengan nilai capaian kinerja sebesar 104,04 persen. Hanya terdapat satu indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat, namun realisasinya menunjukkan peningkatan.

Capaian Kinerja Tujuan Pertama


Tujuan Pertama terdiri dari satu sasaran strategis yaitu: Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas dengan indikator:

1. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.
2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.

Tabel 11. Capaian Kinerja Tujuan Pertama BPS Kota Palembang Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	100	100	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama					100

Dari tabel di atas dapat diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran strategis tujuan pertama telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100 persen. Sasaran strategis tujuan pertama terdiri dari 2 indikator dan masing-masing indikator telah mencapai target yang ditetapkan.



Indikator Pertama Sasaran Strategis Pertama diperoleh berdasarkan hasil survei kebutuhan data tahun 2022 dengan rumus :

$$P = \frac{x}{y} \times 100\%$$

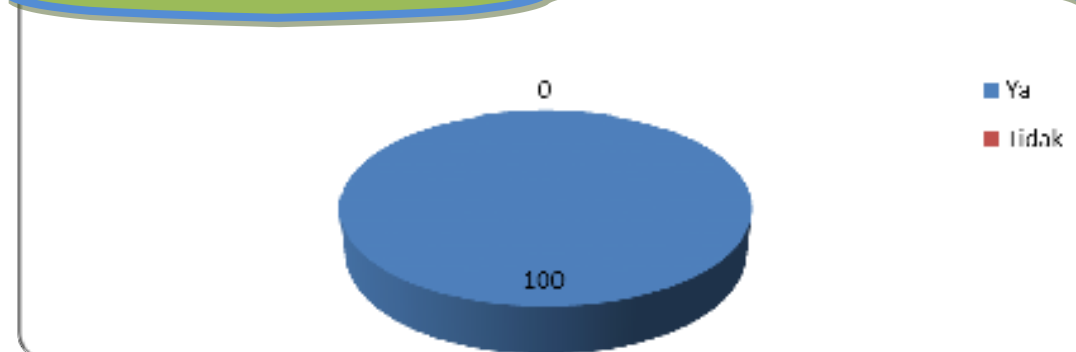
P = Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi
x = Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi
y = Jumlah seluruh konsumen

Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Monitoring yaitu mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi pembangunan adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai.

Sejalan dengan visi BPS 2020-2024, yaitu "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju", BPS menyediakan data statistik untuk mendukung Indonesia Maju, baik dalam tahap perencanaan, monitoring, maupun evaluasi pembangunan, terutama bagi pemerintahan. Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang dilaksanakan BPS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Untuk menjawab kebutuhan hasil SKD, hasil kegiatan SKD disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik pengguna data, analisis kebutuhan data, dan analisis performa unit pelayanan dalam ruang lingkup PST BPS Kota Palembang. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) BPS Kota Palembang yang rilis pada bulan Desember di website BPS Kota Palembang.

Pengguna data dapat mengakses data BPS terkini yang secara konsisten selalu di-*update*. Selain itu, BPS Kota Palembang juga menyusun Berita Resmi Statistik (BRS) dan infografis untuk indikator-indikator penting ketika data tersebut sudah dirilis oleh BPS. BRS dapat diunduh di website BPS Kota Palembang, sedangkan infografis dapat dilihat di Instagram dan website BPS Kota Palembang.

Gambar 3 Persentase Konsumen di PST BPS Kota Palembang yang Berasal dari K/L/OPD Menggunakan Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Nasional



Berdasarkan hasil survei kebutuhan data dapat diperoleh hasil dari Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional adalah sebesar 100 persen sehingga capaian kinerjanya menjadi 100 persen. Pada Tahun 2022 BPS Kota Palembang telah mengembangkan inovasi WhatsBot. Selama ini, website pelayanan kurang dikenal oleh masyarakat pengguna data. Pengguna data lebih banyak melakukan konsultasi atau permintaan data melalui media sosial atau whatsapp langsung kepada pegawai BPS Kota Palembang. Untuk memfasilitasi hal tersebut sekaligus mempersingkat birokrasi dalam pelayanan statistik, BPS Kota Palembang menyediakan WhatsApp resmi pelayanan BPS Kota Palembang.

WhatsApp pelayanan ini merupakan layanan otomatis berbalas yang dapat diakses langsung oleh pengguna data. Adapun layanan yang dapat diakses melalui WA ini adalah pelayanan *whistle blower* (layanan pengaduan), informasi statistik terkini, konsultasi statistik, permintaan mikro data, dan lokasi kantor. Melalui media WA ini diharapkan dapat mempersingkat waktu pelayanan dan mempermudah pengguna data dalam mengakses produk-produk BPS, khususnya di wilayah Kota Palembang. Bagi pemerintah atau OPD WhatsApp Bot ini bermanfaat mempersingkat waktu untuk mendapatkan informasi statistik terkini dan akses lebih mudah dan cepat dalam melakukan konsultasi statistik sehingga dapat mereka gunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.

Berbagai macam produk statistik di BPS Kota Palembang diantaranya publikasi dan Berita Resmi Statistik dimaksudkan untuk memotret serta menyajikan indikator-indikator penting yang menggambarkan tentang kondisi daerah dalam bentuk tampilan uraian deskriptif. Dengan produk ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat dan tepat kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan pembangunan di berbagai able serta membantu para pengguna data lainnya dalam memahami kondisi daerah. Data BPS Kota Palembang telah banyak digunakan oleh masyarakat baik oleh pemerintah daerah, akademisi, pihak peneliti dan sebagainya (dapat dilihat dari jumlah visitor *website*). Dari Tabel 8 terlihat jumlah visitor *website* BPS Kota Palembang selalu mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan menurun pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan pengguna data lebih banyak menggunakan whatsapp bot dalam pencarian data maupun konsultasi statistik sehingga jumlah pengunjung *website* mengalami penurunan. Akan tetapi, pada tahun 2022, jumlah pengunjung *website* kembali mengalami peningkatan hamper 20 persen.

Tabel 12. Jumlah Pengunjung Website BPS Kota Palembang

Tahun	Jumlah Pengunjung
2018	37.139
2019	49.352
2020	54.594
2021	43.430
2022	51.847

Indikator kedua Sasaran Strategis pertama yaitu Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Pada tahun 2022 BPS Kota Palembang menerbitkan 26 publikasi dan sebanyak 6 publikasi telah memuat data dan informasi terkait hasil standar akurasi.



Kriteria publikasi dikatakan menerapkan standar akurasi adalah:

Publikasi tersebut memuat indikator yang bersumber dari survei yang memenuhi standar akurasi oleh PMSS.

Publikasi tersebut memuat data hasil kompilasi, apabila ada bersumber dari survei yang memenuhi standar akurasi maka dianggap menerapkan standar akurasi.

Publikasi tidak harus menampilkan RSE, cukup memuat indikator yang bersumber dari survei yang memenuhi standar akurasi.

Capaian kinerja ini sebesar 100 persen dengan realisasi 100 persen dan target 100 persen. Dalam rangka penyusunan publikasi tersebut BPS Kota Palembang berkoordinasi dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan mengenai data kependudukan, pendidikan, kesehatan, fertilitas, perumahan, konsumsi dan pengeluaran, penggunaan teknologi dan informasi, program perlindungan sosial dan estimasi sampling error.

Publikasi yang bersumber dari aktivitas statistik dengan menerapkan standar akurasi yang telah berhasil dirilis tepat waktu, yaitu:

1. Palembang Dalam Angka 2022
2. PDRB Menurut Lapangan usaha 2017-2021
3. PDRB Menurut Pengeluaran 2017-2021
4. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2022
5. Statistik Ketenagakerjaan Kota Palembang 2021
6. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2022.

Data dan informasi diperlukan dalam rangka mendukung proses perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil pembangunan agar dapat berjalan dengan baik. Data mengenai keadaan sosial ekonomi dibutuhkan untuk memberikan gambaran pencapaian pembangunan dan juga dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk mengevaluasi program-program pembangunan. Data yang terkait dengan kebutuhan hidup masyarakat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesempatan kerja diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil-hasil pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua terdiri dari 1 sasaran strategis yaitu Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN dengan 2 indikator, yaitu :

1. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
2. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar


Capaian Kinerja dari indikator yang mengukur sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 13. Hasil Capaian Kinerja Tujuan Kedua BPS Kota Palembang Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN					
Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	41	50	120
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	76	76	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua					110

Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, instansi pemerintah yang akan melakukan kegiatan statistik diwajibkan melaporkan kegiatan statistik yang akan dilaksanakan kepada BPS. Menurut PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 Ayat 2 menjelaskan bahwa penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib:

1. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS
2. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
3. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS



Setelah diteliti dan diproses oleh BPS akan dikeluarkan suatu rekomendasi yang menyatakan kegiatan yang bersangkutan layak atau tidak untuk dilanjutkan. BPS wajib meneliti dan mengevaluasi rancangan penyelenggaraan survei sektoral, meliputi:

1. Tujuan Survei
2. Jenis data yang akan dikumpulkan
3. Wilayah kegiatan statistik
4. Metode statistik yang akan digunakan
5. Objek populasi dan jumlah responden
6. Waktu pelaksanaan

Rekomendasi perlu dilaksanakan agar tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik sektoral dan membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional. BPS Kota Palembang berkoordinasi dengan sekretaris daerah dalam rangka pengajuan rekomendasi statistik oleh Dinas/Instansi. Sebagai bentuk dukungan, Sekretaris Daerah mengeluarkan surat Nomor: 555/002095/kominfo/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral. Dalam surat ini Sekretaris Daerah menghimbau kepada seluruh OPD sebagai berikut:

1. Melaporkan dan meminta rekomendasi BPS setiap pelaksanaan survei statistik sektoral yang hasilnya dipublikasikan.
2. Melaporkan dan meminta rekomendasi BPS setiap kegiatan kompilasi produk administrasi yang hasilnya dipublikasikan.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan survei statistik sektoral yang hasilnya dipublikasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
4. Melaporkan hasil kegiatan kompilasi produk administrasi yang hasilnya dipublikasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

Pada tahun 2022 BPS Kota Palembang mengeluarkan surat rekomendasi statistik sebanyak 6, yaitu :

1. B-185/16711/VS.100/04/2022 tanggal 12 April 2022 dengan judul " Survei Harga Ikan Kota Palembang".
2. B-537/16711/VS.100/12/2022 tanggal 06 September 2022 dengan judul " Survei Harga Barang Kota Palembang".


3. B-536/16711/VS.100/12/2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan judul “Penyusunan Laporan Pengendalian Inflasi Kota Palembang” .
4. B-539/16711/VS.100/12/2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan judul “Pengumpulan Data Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Palembang” .
5. B-564/16711/VS.100/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 dengan judul “Survey Kepuasan Pengunjung Museum” .
6. B-565/16711/VS.100/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 dengan judul “Mengukur Kinerja Pelayanan PDAM Tirta Musi Palembang”.

Kegiatan statistik ini dapat diakses pada website <https://romantik.bps.go.id/site/pencarian/> website rekomendasi statistik (Romantik) online. Dari capaian tersebut realisasi dari persentase OPD yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik yaitu sebesar 50 persen dari target 41 persen dengan capaian kinerja sebesar 120 persen.

Gambar 5. Penyelenggaraan Rekomendasi Statistik Kota Palembang Tahun 2022

No	Penyelenggara	Judul Kegiatan	Status Rekomendasi	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Waktu Perbaikan	Aksi
1	PDAM Tirta Musi Kota Palembang	Mengukur Kinerja Pelayanan PDAM Tirta Musi Palembang	UWAS		19 Desember 2022 Pukul 10.00	19 Desember 2022 Pukul 11.00	🔍
2	Dinas Kebudayaan Kota Palembang	Survey Kepuasan Pengunjung Museum	UWAS		19 Desember 2022 Pukul 10.00	19 Desember 2022 Pukul 10.30	🔍
3	Dinas Kebudayaan Kota Palembang	Pengumpulan Data Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Palembang	UWAS		05 Desember 2022 Pukul 10.00	05 Desember 2022 Pukul 10.30	🔍
4	Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang	Pengumpulan Data Jumlah Pengunjung ke Museum	UWAS		05 Desember 2022 Pukul 10.00	05 Desember 2022 Pukul 10.30	🔍
5	Dinas Pengendalian Inflasi Kota Palembang	Mengukur Kinerja Pengendalian Inflasi Kota Palembang	UWAS		05 Desember 2022 Pukul 10.00	05 Desember 2022 Pukul 10.30	🔍
6	Dinas Perencanaan Pembangunan Kota Palembang	Survey Kepuasan Pengunjung Museum	UWAS		19 Desember 2022 Pukul 10.00	19 Desember 2022 Pukul 10.30	🔍

Indikator Kedua sasaran strategis pertama dari tujuan kedua yaitu Persentase OPD yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus



dilengkapi dengan metadata. Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku. Target pengumpulan metadata statistik tahun 2022 dihitung dari dinas/instansi yang berkontribusi dalam penyusunan Daerah Dalam Angka Tahun 2022.

Daftar OPD yang *support* data Daerah Dalam Angka, yaitu:

1. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Palembang
3. Dinas Kesehatan Kota Palembang
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang
5. Dinas Pariwisata Kota Palembang
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang
9. Dinas Perdagangan Kota Palembang
10. Dinas Perikanan Kota Palembang
11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang
12. Dinas Sosial Kota Palembang
13. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang

Berdasarkan informasi yang didapat dari Pemerintah Kota Palembang, terdapat beberapa dinas yang melakukan kegiatan statistik tahun 2022 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
2. Dinas Pendidikan Kota Palembang
3. Dinas Perhubungan Kota Palembang
4. Dinas Perdagangan Kota Palembang
5. Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
10. Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palembang
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
12. Dinas Kesehatan Kota Palembang

Dari 12 OPD yang melakukan statistik tersebut terdapat 10 OPD yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus tersebut dengan jumlah 13 metadata yang terkumpul, yaitu:

Tabel 14. Kegiatan Metadata Statistik Sektoral dan Khusus

No	Nama Kegiatan Statistik	Dinas/Instansi
1	Survei Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Kota Palembang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang
2	Survei Populasi Transportasi Publik (SDG'S) Kota Palembang	Dinas Perhubungan Kota Palembang
3	Survei Kepuasan Masyarakat Bappeda Litbang Kota Palembang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
4	Kompilasi Data untuk Penyusunan Buku Profil Dinas Pendidikan Kota Palembang	Dinas Pendidikan Kota Palembang
5	Kompilasi Data untuk Penyusunan Buku Profil Perkembangan Penduduk Kota Palembang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
6	Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
7	Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Palembang	Dinas Pendidikan Kota Palembang
8	Survei Harga barang dan Jasa Kota Palembang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
9	Survei Lalu Lintas Harian Rata-rata Kota Palembang	Dinas Perhubungan Kota Palembang
10	Sensus jumlah perusahaan di Kota Palembang	Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang
11	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di DPMPTSP Kota Palembang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
12	Survei Kepuasan Pelanggan PDAM Tirta Musi Kota Palembang	PDAM Tirta Musi Kota Palembang
13	Pengumpulan Data Statistik Sektoral Kelurahan Dalam Angka	Kantor Kelurahan

Gambar 6. Daftar Pelaporan Metadata Statistik Kota Palembang Tahun 2022

No. Item Laporan	Tahun	Jenis Statistik	Penerimaan	Tanggal Upload	Pelajar	Penerima	Status	Aksi
1. Rapor Kinerja Pelayanan dan Mutu Layanan Kesehatan	2022	Statistik Sektor	Ekspansi Perencanaan dan Pelaksanaan	21 Desember 2022	Rizki Nurrahma	Rizki Nurrahma	Selesai	Detail Edit Hapus
2. Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	2022	Statistik Sektor	Ekspansi Perencanaan dan Pelaksanaan	21 Desember 2022	Rizki Nurrahma	Rizki Nurrahma	Selesai	Detail Edit Hapus
3. Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	2022	Statistik Sektor	Ekspansi Perencanaan dan Pelaksanaan	21 Desember 2022	Rizki Nurrahma	Rizki Nurrahma	Selesai	Detail Edit Hapus
4. Rapor Kinerja Pelayanan dan Mutu Layanan Kesehatan	2022	Statistik Sektor	Ekspansi Perencanaan dan Pelaksanaan	18 Desember 2022	Rizki Nurrahma	Rizki Nurrahma	Selesai	Detail Edit Hapus
5. Rapor Kinerja Pelayanan dan Mutu Layanan Kesehatan	2022	Statistik Sektor	Ekspansi Perencanaan dan Pelaksanaan	21 Desember 2022	Rizki Nurrahma	Rizki Nurrahma	Selesai	Detail Edit Hapus
6. Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	2022	Statistik Sektor	Ekspansi Perencanaan dan Pelaksanaan	21 Desember 2022	Rizki Nurrahma	Rizki Nurrahma	Selesai	Detail Edit Hapus
7. Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	2022	Statistik Sektor	Ekspansi Perencanaan dan Pelaksanaan	18 Desember 2022	Rizki Nurrahma	Rizki Nurrahma	Selesai	Detail Edit Hapus
8. Rapor Kinerja Pelayanan dan Mutu Layanan Kesehatan	2022	Statistik Sektor	Ekspansi Perencanaan dan Pelaksanaan	21 Desember 2022	Rizki Nurrahma	Rizki Nurrahma	Selesai	Detail Edit Hapus

No. Item Laporan	Tahun	Jenis Statistik	Penerimaan	Tanggal Upload	Pelajar	Penerima	Status	Aksi
1. Rapor Kinerja Pelayanan dan Mutu Layanan Kesehatan	2022	Statistik Sektor	Ekspansi Perencanaan dan Pelaksanaan	20 Desember 2022	Rizki Nurrahma	Rizki Nurrahma	Selesai	Detail Edit Hapus
2. Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	2022	Statistik Sektor	Ekspansi Perencanaan dan Pelaksanaan	20 Desember 2022	Rizki Nurrahma	Rizki Nurrahma	Selesai	Detail Edit Hapus
3. Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	2022	Statistik Sektor	Ekspansi Perencanaan dan Pelaksanaan	20 Desember 2022	Rizki Nurrahma	Rizki Nurrahma	Selesai	Detail Edit Hapus
4. Rapor Kinerja Pelayanan dan Mutu Layanan Kesehatan	2022	Statistik Sektor	Ekspansi Perencanaan dan Pelaksanaan	18 Desember 2022	Rizki Nurrahma	Rizki Nurrahma	Selesai	Detail Edit Hapus
5. Rapor Kinerja Pelayanan dan Mutu Layanan Kesehatan	2022	Statistik Sektor	Ekspansi Perencanaan dan Pelaksanaan	21 Desember 2022	Rizki Nurrahma	Rizki Nurrahma	Selesai	Detail Edit Hapus

Pengumpulan metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 2 metadata. Dalam rangka pengumpulan metadata statistik sektoral dan khusus di BPS Kota Palembang membentuk 6 tim yang beranggotakan 2 orang. Strategi yang dijalankan membawa perbaikan. Pada tahun 2022 ini BPS Kota Palembang berhasil mengumpulkan metadata statistik sektoral dan khusus sebanyak 14 metadata. Pencapaian tersebut menghantarkan BPS Kota Palembang mencapai target yang ditetapkan.

Kendala/permasalahan dalam penyampaian metadata statistik sektoral dan khusus:

1. Kesulitan mengidentifikasi instansi mana saja yang pernah melakukan kegiatan statistik khusus dan sektoral

2. Kesulitan dalam menjelaskan kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan statistik sektoral dan khusus kepada responden.
3. Pada masa pandemi covid-19, dibutuhkan peran aktif instansi pemerintah dalam penyusunan metadata sektoral. Sedangkan yang terjadi di lapangan PIC (*Person In Charge*) sulit ditemui dan kadang PIC sudah dirotasi tapi belum mempunyai pengalaman.
4. Pengisian kuesioner pun masih ada yang tidak lengkap.

Strategi dalam mengatasi kendala:


1. Menjelaskan secara detil kegiatan apa saja yang bisa dikategorikan ke dalam kegiatan statistik sektoral dan statistik khusus.
2. Menjalankan strategi pengumpulan metadata statistik sektoral dan khusus melalui tim kerja.
3. Melakukan identifikasi kegiatan statistik dinas kemudian melakukan kunjungan langsung ke dinas untuk pengumpulan metadata kegiatan statistik yang dilakukan dinas atau membuka konsultasi metadata statistik bagi dinas yang membutuhkan.

Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan Ketiga terdiri dari satu sasaran strategis “Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I” dengan satu indikator yaitu Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik. Capaian Kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 15 . Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kota Palembang Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	92	100	108,33
Rata – rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ketiga					108,33



Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral, BPS melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan secara berkala. Kurangnya pemahaman kaidah-kaidah penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral sehingga BPS Kota Palembang menyelenggarakan sosialisasi sebanyak 7 kali dengan dibantu secara penuh oleh Bappeda Litbang dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Kunjungan dan sosialisasi tersebut dalam rangka teknik penyajian data dasar dan sektoral Kota Palembang dan Satu Data Indonesia Kota Palembang. Sosialisasi atau pembinaan yang dilakukan, yaitu:

1. Sosialisasi SDI dan Romantik di Dinas Kominfo dan Informatika
2. Pembinaan Statistik di Sekretariat Daerah dalam acara Rapat Pengumpulan Data Sektoral
3. Pembinaan statistik di Sekretariat Daerah dalam acara Satu Data Indonesia Kota Palembang
4. Pembinaan Statistik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam acara Pembahasan Penyajian Data Dasar dan Data Sektoral Kota Palembang
5. Pembinaan Statistik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam acara Manajemen Data Satu Data Palembang
6. Pembinaan Statistik di Sekretariat Daerah dalam acara Koordinasi Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Kota Palembang
7. Pembinaan Statistik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam acara Pembahasan Kebutuhan Data *time series* perencanaan pembangunan Kota Palembang untuk penyusunan profil data Kota Palembang



Dalam kegiatan pembinaan statistik, perlu adanya optimalisasi peran Koordinator dan Walidata untuk meningkatkan peran OPD dalam rekomendasi statistiknya. Kegiatan pembinaan statistik selama tahun 2022 dilakukan di 13 OPD, yaitu:

1. Tata Pemerintah Kota Palembang
2. BPKAD Kota Palembang
3. Dinas Kebudayaan Kota Palembang
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. DPMPTSP Kota Palembang
6. Kecamatan Seberang Ulu Dua dan Plaju
7. Kecamatan Seberang Ulu Satu, Kertapati. Dan Jakabaring
8. Kecamatan Gandus dan Ilir Barat II
9. Kecamatan Sukarami dan Alang-Alang Lebar
10. Kecamatan Ilir Barat I dan Bukit Kecil
11. Kecamatan Ilir Timur I dan Kemuning
12. Kecamatan Ilir Timur II, Ilir Timur III, dan Sako
13. Kecamatan Kalidoni dan Sematang Borang.

Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam rangka tata kelola kelembagaan. Untuk mengukur sasaran strategis SDM Statistik yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan, BPS Kota Palembang menetapkan dua indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Capaian Kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 16. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Kota Palembang Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					
Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Persen	70	69,96	99,94
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat					99,97

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Indikator pertama dari sasaran strategis keempat tujuan keempat yaitu point Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 70 poin, dan hasil penilaian dari Inspektorat yaitu 69,88 poin atau capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 99,83 persen. Pada tahun 2022, BPS Kota Palembang menetapkan poin hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat sebesar 70 poin, hasil penilaian dari Inspektorat sebesar 69,96 sehingga capaian kinerja hanya sebesar 99,94 persen.

Penyusunan dokumen SAKIP di BPS Kota Palembang diawali dengan kegiatan perencanaan kinerja. Rencana kinerja yang tersusun bertujuan untuk membantu dalam proses akuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja organisasi serta mendorong pimpinan fokus dalam menjalankan strategi organisasi. Penyusunan rencana kinerja pada BPS Kota Palembang dilakukan dengan mengundang seluruh Tim SAKIP yang bertugas mengelola kegiatan SAKIP di BPS Kota Palembang. Dokumen yang dihasilkan berupa rencana aksi/perjanjian kinerja yang memuat target, output dan outcome yang dihasilkan oleh organisasi dalam setahun. Perencanaan kinerja tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.



Selanjutnya untuk melihat perkembangan dari target yang telah ditetapkan, dilakukan pemantauan kinerja secara berkala setiap triwulan. Pemantauan yang dilakukan berupa rapat yang dihadiri oleh seluruh tim SAKIP. Pemantauan kinerja bertujuan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), berdampak pada kehidupan bernegara, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan *good governance*, maka perlu ada reformasi dalam birokrasi sebab menyangkut penyelenggaraan negara untuk mewujudkan perbaikan. Dalam mewujudkan *good government* perlu dilaksanakan penilaian pencapaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP Instansi Pemerintah. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN & RB) menugaskan kepada seluruh jajaran Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat di lingkungan Instansi masing-masing untuk melaksanakan “Evaluasi” sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang “Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, dan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2011 tentang “Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal”. Hasil capaian penilaian kinerja BPS Kota Palembang yang belum mencapai target tersebut akan lebih memacu pegawai untuk lebih meningkatkan nilai sakip di tahun yang akan datang.

Dalam mengevaluasi kegiatan, setiap minggu BPS Kota Palembang mengadakan Rapat evaluasi kinerja mingguan. Rapat evaluasi kinerja ini dimaksudkan untuk memonitoring kegiatan di BPS Kota Palembang. Melalui rapat ini setiap koordinator fungsi dapat mengetahui kendala-kendala setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan dapat mencari solusi dan dapat melakukan tindak lanjut atas kendala yang terjadi, sehingga setiap permasalahan dapat diatasi sebaik mungkin.

Pada tahun 2022 BPS Kota Palembang mendapat penghargaan dari BPS RI sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Badan Pusat Statistik. Penghargaan ini merupakan tantangan bagi BPS Kota Palembang untuk bekerja bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan menghasilkan statistik yang berkualitas.

Persentase Kepuasan Pengguna data Terhadap pemenuhan Sarana dan prasarana Pelayanan BPS

Indikator sasaran strategis tujuan keempat yaitu persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{x}{y} \times 100\%$$

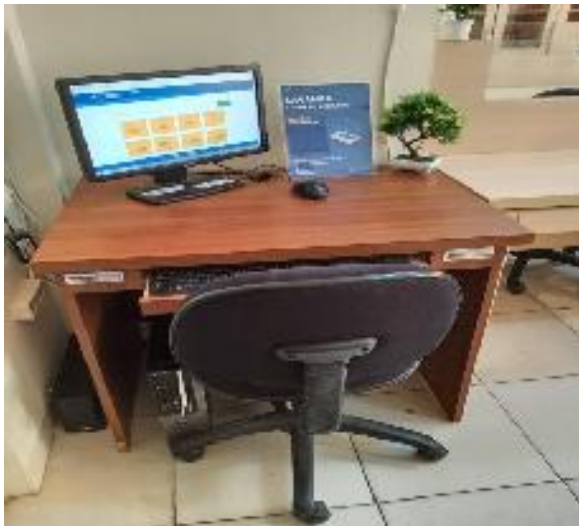
P = Persentase kepuasan pengguna data terhadap pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan BPS

x = Jumlah konsumen data yang merasa puas dengan sarana dan prasarana BPS

y = Jumlah seluruh konsumen

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin). Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Prasarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Sarana dan prasarana yang baik merupakan salah satu komponen dalam pelayanan. BPS Kota Palembang telah memiliki gedung untuk ruangan Pelayanan Statistik Terpadu. Ruangannya tersebut telah dilengkapi fasilitas komputer dan jaringan wifi, Layanan meja konsultasi statistik, sarana pengaduan, kotak saran dan informasi standar pelayanan.



Untuk layanan konsultasi statistik BPS Kota Palembang telah memberikan jadwal kepada petugas untuk melayani konsultasi. Pada masa pandemi ini jadwal konsultasi dilakukan secara bergantian. Apabila petugas berhalangan maka seluruh pegawai BPS Kota Palembang yang mengerti dan memahami dapat melayani konsultasi statistik.



Kotak saran telah tersedia di PST BPS Kota Palembang sehingga konsumen yang datang ke PST BPS Kota Palembang dapat mengajukan saran agar kenyamanan pelayanan yang diberikan dapat terjaga. Selain itu pada Website BPS Kota Palembang telah tersedia layanan bagi pengguna data untuk mengadakan pelanggaran yang berindikasi adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara. Materi pengaduan yang ditindaklanjuti pada sistem ini adalah laporan terkait pelanggaran berupa:

1. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2. Penyalahgunaan Wewenang
3. Disiplin Pegawai
4. Standar Pelayanan
5. Hambatan Pelayanan

dan terhadap identitas diri setiap pelapor dijamin kerahasiaannya.



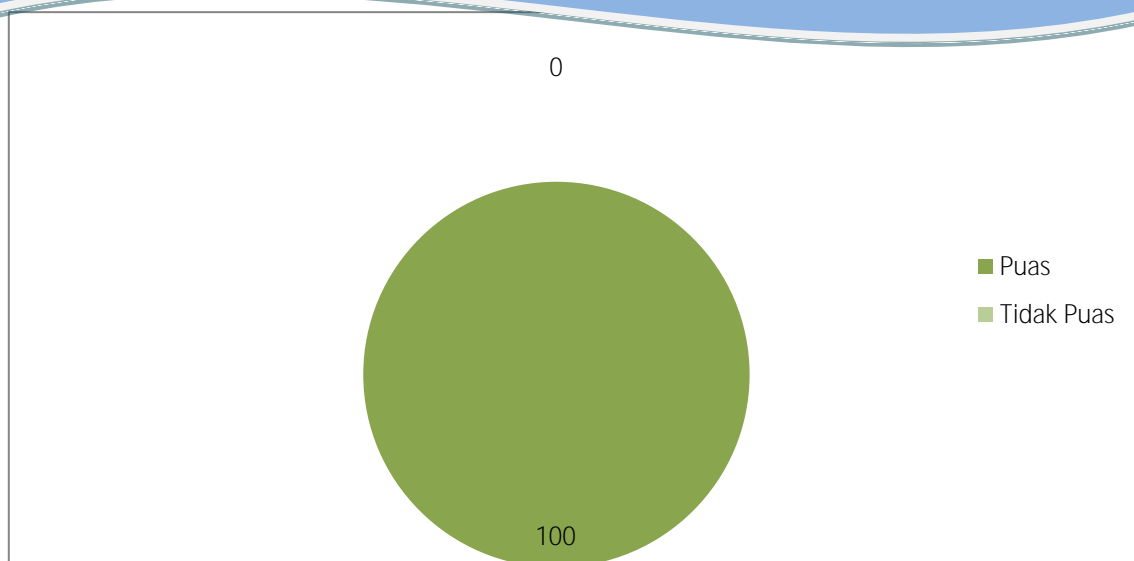
BPS Kota Palembang juga telah memiliki sarana pojok baca yang berisi novel dan buku-buku islami. Bagi setiap pengguna data dapat menggunakan fasilitas ini setelah datang mengunjungi PST.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pada tahun 2022 BPS Kota Palembang bekerja sama dengan DPMPTSP menyediakan fasilitas Pojok Statistik di Mall Pelayanan Publik Kota Palembang. Dengan hadirnya Pojok Statistik ini diharapkan dapat lebih mempermudah pengguna data untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam mewujudkan Pojok Statistik ini ditemukan banyak kendala terkait anggaran untuk membuat tempat pelayanan mandiri, banner, dan lain-lain. Selain itu, keterbatasan SDM dan banyaknya kegiatan internal BPS menjadi penghambat sehingga Pojok Statistik baru bisa terealisasi di akhir tahun 2022.

Dalam rangka meningkatkan manfaat sarana dan prasarana di BPS Kota Palembang, telah diadakan pemeliharaan gedung kantor yang meliputi:

1. Pekerjaan pemeliharaan gedung dan halaman kantor
2. Pemeliharaan AC, printer, laptop, dan PC
3. Pemeliharaan inventaris dan BMN lainnya.

Gambar 7. Persentase Kepuasan Pengguna Data Terhadap Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan BPS



Capaian Kinerja PK Suplemen Tahun 2022

Capaian kinerja dari PK Suplemen tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 17.

Tabel 17. Hasil Capaian Kinerja PK Suplemen Tahun 2022

Sasaran	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target PK	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan kinerja dalam rangka reformasi birokrasi dan tata kelola kelembagaan	Persentase realisasi anggaran terhadap pagu	Persen	98	99,53	101,53
	Tersedianya Layanan Pojok Statistik	Unit	1	1	100
	Jumlah Desa Cinta Statistik (Cantik)	Desa	2	4	120
	Satker berpredikat WBK WBBM dari KemenpanRB	Satker	1	1	100
	Persentase pelaporan dokumen melalui SPI online	Persen	100	100	100
	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN/LHKASN	Persen	100	100	100
	Terselenggaranya pengukuran Indeks Pembangunan Statistik	Pemda	1	1	100

Capaian kinerja PK suplemen tahun 2022 secara rata-rata sebesar 103,07. Secara keseluruhan pencapaian target PK suplemen adalah 100 persen tercapai pada seluruh indikator kinerja. Persentase terbesar berasal dari tercapainya pembinaan Desa Cantik (Cinta Statistik), yaitu 120 persen. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang menghasilkan nilai IPS tahun 2022 juga berhasil dilaksanakan oleh Tim TPB BPS Kota Palembang. Kegiatan yang diawali dengan sosialisasi EPSS ke dinas/OPD sangat didukung oleh Bappeda dan Kominfo sehingga dapat dilaksanakan di kantor Bappeda dengan mengundang dinas/OPD lain. Selanjutnya, dioptimalkan fungsi Walidata (Dinas Kominfo) untuk mengkoordinir dan memonitoring penyelesaian kegiatan EPSS. Untuk mengatasi kendala selama penilaian mandiri, maka dilakukan pendampingan langsung oleh TPB Kota Palembang di Kantor BPS Kota Palembang.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang

Apabila dilihat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dapat lihat perkembangan capaian kinerja tujuan secara umum di atas 100 persen meskipun terjadi penurunan dari sebelumnya sebesar 105,35 persen menjadi 104,04 persen. Penurunan ini terjadi karena adanya perubahan pada target yang ditetapkan. Beberapa indikator yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya adalah sebagai berikut

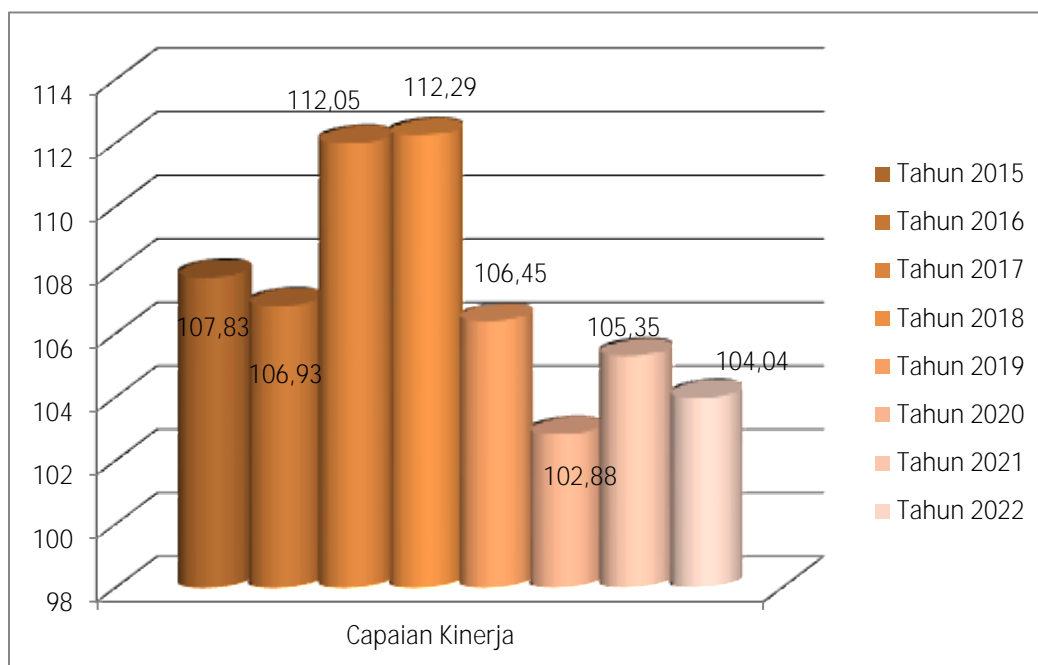
1. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 BPS Kota Palembang menetapkan target 75 persen meningkat di Tahun 2022 menjadi 100 persen. Penetapan target menjadi 100 persen karena sejak tahun 2020 realisasi persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional sebesar 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa data BPS Kota Palembang semakin digunakan dan bermanfaat untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.
2. Setiap tahun jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang mengajukan rekomendasi statistik ke BPS Kota Palembang semakin bertambah. Pada Tahun 2021 terdapat 3 pengajuan rekomendasi sedangkan tahun 2022 terdapat 6 pengajuan rekomendasi.
3. Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar juga mengalami peningkatan. Tahun 2021 hanya terdapat 9 instansi yang menyusun metadata statistik sektoral dan khusus, sedangkan di tahun 2022 sebanyak 13 metadata yang berasal dari 10 Instansi sehingga realisasi capaian kinerja tahun 2022 meningkat dari 69,23 persen menjadi 100 persen.
4. Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan statistik di tahun 2022 mengalami peningkatan hingga capaian kinerja mencapai 108,33 persen, naik dari tahun 2021 yang sebesar 100 persen.
5. Capaian kinerja hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 meskipun belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Tahun 2021 hasil penilaian SAKIP BPS Kota Palembang sebesar 69,88 poin meningkat menjadi 69,96 poin di tahun 2022.

Tabel 18. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2021-2022

Tujuan (1)	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)	
	2021 (2)	2022 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2021 (6)	2022 (7)
1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					110	100
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas					110	100
Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	75	100	100	100	120	100
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	4	100	4	100	100	100
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN					100	110
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN					100	110
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	100	41	100	50	100	120
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	69,23	76	69,23	76	100	100
3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					100	108,33
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I					100	108,33
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	2,5	92	2,5	100	100	108,33
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					99,92	99,97
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan					99,92	99,97
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	70	70	69,88	69,96	99,83	99,94
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	81,67	100	81,67	100	100	100
Rata- rata Capaian Kinerja Tujuan					105,35	104,04

Capaian Kinerja dari Tahun 2015 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada gambar 9 berikut:

Gambar 8. Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2015-2022



Indikator Kinerja yang terdapat pada Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat
2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Penilaian SAKIP BPS Kota Palembang yang dimulai pada tahun 2017 mendapat nilai sebesar 58,21 persen, selanjutnya terlihat peningkatan penilaian SAKIP. *Field Evaluation* Implementasi SAKIP dilaksanakan dengan mengevaluasi atas beberapa komponen, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan
4. Evaluasi Kinerja
5. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi

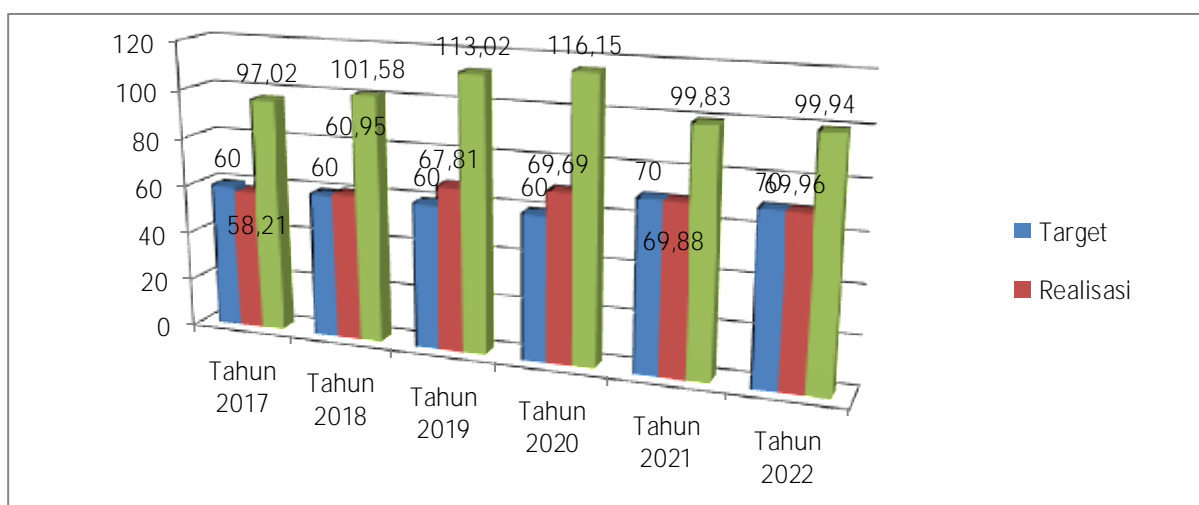
Perkembangan Capaian kinerja penilaian SAKIP dari tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Capaian Kinerja Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat
Tahun 2017 -2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2017	60	58,21	97,02
2	2018	60	60,95	101,58
3	2019	60	67,81	113,02
4	2020	60	69,69	116,15
5	2021	70	69,88	99,83
6	2022	70	69,96	99,94

Capaian kinerja Hasil penilaian SAKIP BPS Kota Palembang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dan menurun di Tahun 2021 menjadi 99,83 persen. Penurunan tersebut bukan karena disebabkan nilai realisasi menurun tetapi karena target yang lebih besar dari tahun kemarin. Pada tahun 2022 capaian kinerja meningkat menjadi 99,94 persen meskipun target yang ditetapkan belum tercapai.

Gambar 9. Capaian Kinerja Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat BPS Kota Palembang
Tahun 2017-2022



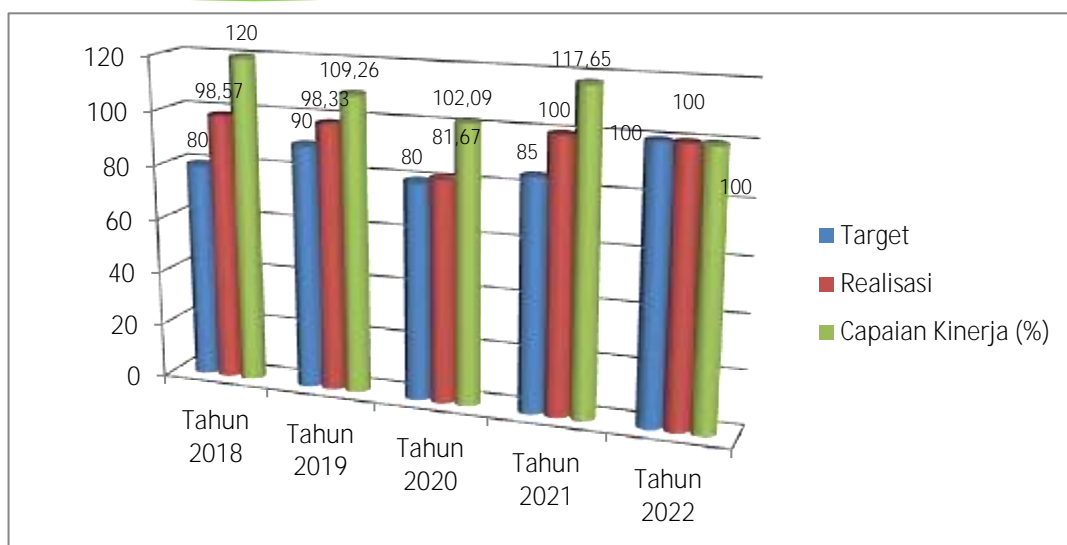
Indikator kinerja Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS selama tahun 2018 – 2020 terlihat penurunan dan meningkat di tahun 2021. Meskipun capaian kinerja turun di tahun 2022, akan tetapi realisasi meningkat. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan target dibandingkan tahun 2021. Perkembangan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Persentase Kepuasan Pengguna Data Terhadap Sarana dan Prasarana Pelayanan BPS Selama Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2018	80	98,57	120
2	2019	90	98,33	109,26
3	2020	80	81,67	102,09
4	2021	85	100	117,65
5	2022	100	100	100

Capaian kinerja kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS tertinggi pada tahun 2018 dengan nilai capaian 120 persen dengan realisasi capaian kinerja 98,57 persen. Sedangkan pada tahun 2022 nilai capaian kinerja sebesar 100 persen dengan realisasi 100 persen.

Gambar 10. Persentase Kepuasan Pengguna Data Terhadap Sarana dan Prasarana Pelayanan BPS



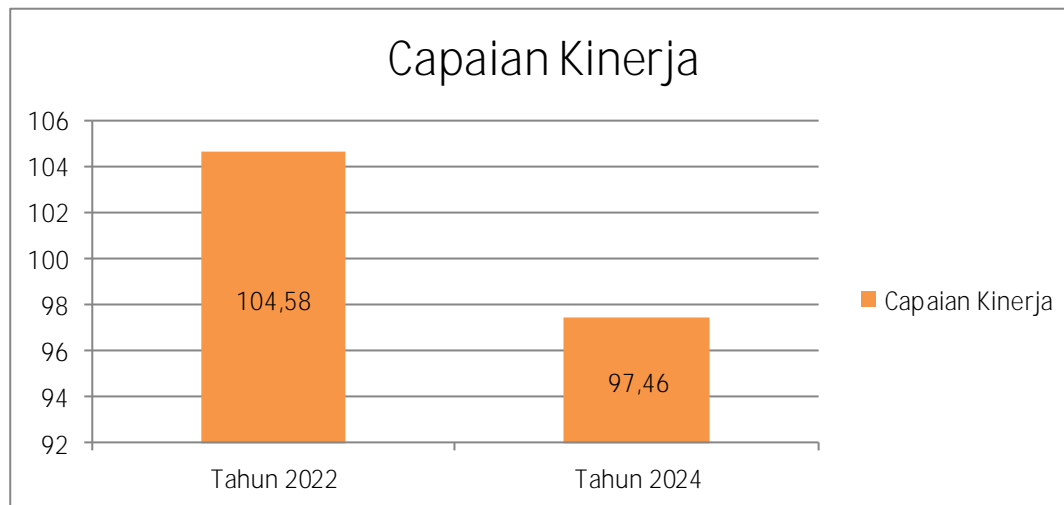
3.3. Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2022 terhadap Target Renstra 2020-2024

Capaian kinerja 2022 terhadap target Renstra 2022 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Capaian Kinerja Rencana Strategis 2022 dan 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Renstra Tahun 2022		Renstra Tahun 2024	
			Target (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Capaian Kinerja (%)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				100		100
Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	100	100	100	100	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	100	100	100	100	100
2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN				110		86,23
Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	50	41	120	61	81,97
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	76	76	100	84	90,48
3. Meningkatkan Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				108,33		104,17
Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	100	92	108,33	96	104,17
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi				99,97		99,42
SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	69,96	70	99,94	71	98,54
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	100	100	100	99,7	100,3
Rata- rata Capaian Kinerja				104,58		97,46

Gambar 11. Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Rencana Strategis 2022 dan 2024



Pada Tahun 2022 Capaian Kinerja BPS Kota Palembang sesuai dengan Renstra 2020-2024 menunjukkan telah mencapai target dengan capaian kinerja total sebesar 104,58 persen. Dari 4 tujuan hanya satu tujuan yang belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu tujuan keempat "Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi" yang hanya mencapai 99,97 persen, dengan indikator Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat yang tidak mencapai 100 persen (99,94 persen), sedangkan tujuan lain lebih dari 100 persen. Bahkan indikator "Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik" memperoleh capaian kinerja lebih dari 120 persen.

Tahun 2022 menunjukkan keberhasilan dari BPS Kota Palembang, bahwa walaupun dalam masa pandemi covid-19, BPS Kota Palembang mampu mencapai target yang ditetapkan dalam pengumpulan metadata statistik sektoral dimana pada tahun sebelumnya terdapat 12 metadata sedangkan di tahun 2022 terdapat 13 metadata yang terkumpul. Kondisi ini sesuai dengan rekomendasi pada tahun sebelumnya BPS Kota Palembang harus meningkatkan kinerjanya melalui koordinasi dan kerjasama dengan seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya dalam rangka penyelenggaraan statistik, terutama dalam hal rekomendasi statistik. BPS Kota Palembang juga telah melaksanakan sosialisasi dan pembinaan statistik sehingga pemahaman K/L/D/I tentang romantik *online*, penyusunan metadata statistik sektoral, dan Satu Data Indonesia (SDI) semakin bertambah. Pada tahun 2022 OPD yang mengajukan rekomendasi sebanyak 10 rekomendasi sedangkan tahun sebelumnya hanya 3 kali rekomendasi.


3.3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” adalah dengan “Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas”. Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas adalah 100%, diperoleh dari rata-rata capaian kinerja indikator kinerja “Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional” dan “Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional”. Melalui perspektif *customer*, rekomendasi hasil evaluasi kinerja 2021 yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas oleh instansi pemerintah dan masyarakat luas. Kendala dalam masa penanganan pandemi Covid-19 adalah bagaimana *customer* BPS dapat memperoleh informasi terkait output yang telah dihasilkan oleh BPS. Strategi pencapaian yang dilakukan adalah pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna, sehingga pengguna data dapat lebih mudah mengakses output BPS. Inovasi layanan statistik disampaikan melalui platform berbasis internet, berupa whatsapp bot dan dibentuk Pojok Statistik diharapkan dapat mampu meningkatkan pemanfaatan data statistik yang berkualitas.

3.3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN” adalah melalui “Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN”. Capaian kinerja sasaran strategis Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN adalah 110%, diperoleh dari rata-rata capaian kinerja indikator kinerja “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik” dan “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar” .

Kendala dalam masa penanganan pandemi Covid-19, rekomendasi telah dilakukan atas penguatan kapasitas internal BPS sebagai Pembina Sistem Statistik Nasional, sehingga dapat meningkatkan kualitas data Romantik *Online* yang dilakukan oleh OPD. Tindak lanjut dalam masa penanganan pandemi Covid-19 adalah melaksanakan strategi pengumpulan



data metadata statistik sektoral melalui tim kerja yang melibatkan OPD. Output yang dihasilkan adalah peningkatan pemahaman terkait informasi kegiatan statistik sektoral dan.

3.3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” adalah “Penguatan statistik sektoral K/L/D/I”. Capaian kinerja sasaran strategis Penguatan statistik sektoral K/L/D/I adalah 108,33 persen, diperoleh dari capaian kinerja indikator kinerja “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik”.


Kendala dalam masa penanganan pandemi Covid-19 adalah K/L/OPD yang telah diberikan pembinaan statistik kurang respon terhadap pengajuan rekomendasi statistik. Selain itu, K/L/OPD terkadang masih tertutup terkait kegiatan yang dilakukan dan kurangnya kesadaran K/L/D/I untuk mengumpulkan data yang lebih terencana dengan mengacu pada rekomendasi statistik yang diberikan BPS. Beberapa K/L/OPD yang telah diberikan pembinaan statistik masih melanjutkan kegiatan statistik tahun sebelumnya sehingga tidak mengajukan rekomendasi statistik tahun ini.

Solusi yang dilakukan adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan saat menjadi narasumber pada kegiatan yang melibatkan aparat pemerintah daerah
2. Pendekatan personal kepada pejabat K/L/D/I dan melakukan jemput bola dalam rangka mensosialisasikan kegiatan rekomendasi statistik

3.3.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis SDM Statistik yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” adalah “SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”. Capaian kinerja sasaran strategis SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan adalah 99,97 persen, diperoleh dari rata-rata capaian kinerja indikator kinerja “Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat” dan “Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Kota




Palembang". Kendala dalam masa penanganan pandemi Covid-19 pengembangan SDM tidak dapat dilakukan secara tatap muka dengan seluruh pegawai, strategi pencapaian yang telah dilakukan adalah terlibat aktif dalam *Capacity Building* melalui zoom meeting sejak triwulan I hingga triwulan IV 2022, seperti:

- a. Ngobar seputar SDM BPS RI, dengan tema:
 - Bedah butir kegiatan statistisi
 - Bedah butir kegiatan pranata computer
 - Pemilihan Insan Statistik Teladan BPS
- b. Internalisasi pembangunan Zona Integritas BPS prov. Sumatera Selatan
- c. *Statistical Capacity Building: Tips Menulis Kreatif*
- d. *Smart Day*:
 - Kopi Manis (Komunitas Pegawai Minat Menulis) BPS Prov. Sumatera Selatan
 - Visi dan Misi BPS
 - Pembinaan menuju satker WBK/WBBM BPS Prov. Sumatera Selatan
 - Sharing* kreasi konten video pendek
- e. Webinar berbagai analisis terkait data BPS
- f. Workshop SAKIP
- g. Sosialisasi Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- h. Pelatihan Adobe CC
- i. Webinar "Menulis Opini di Media Massa, Menjadikan Data Kaya Makna"
- j. Kajian Online BPS BPS Provinsi Sumatera Selatan, dll..

Seluruh upaya pencapaian kinerja ini telah ditindaklanjuti secara kolaboratif oleh Kepala BPS Kota Palembang, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tim Teknis dan Administrasi BPS Kota Palembang, serta instansi terkait.

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2022 ini mencapai 100 persen. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja secara umum Terkategori tinggi. Penyebab keberhasilan kinerja ini sebagai berikut:

- 
1. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada tujuan yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
 2. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
 3. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022.
 4. Telah dilaksanakannya setiap mingguan rapat evaluasi kinerja mingguan kegiatan

Selain terdapatnya penyebab yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan dan akan dilaksanakan antara lain :

1. Kurangnya pemahaman pengumpul metadata mengenai metadata dan cara pengisian dokumen metadata sektoral dan khusus. Oleh karena itu, penanggung jawab melaksanakan sosialisasi atau briefing petugas pengumpul metadata sektoral dan khusus serta membuat pedoman ringkas kegiatan statistik sektoral dan khusus sebagai pedoman dalam pengumpulan data.
2. Kurangnya pemahaman kementerian/lembaga/satuan perangkat daerah/instansi lainnya tentang kaidah-kaidah penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral sehingga perlu dilakukan sosialisasi ke K/L/D/I tentang penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Kurangnya pemahaman akan pentingnya rekomendasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan statistik oleh K/L/D/I sehingga perlu dilakukan sosialisasi ke K/L/D/I tentang layanan rekomendasi statistik (Romantik Online)
4. Kurangnya pemahaman konsumen data terhadap layanan statistik yang ada di PST BPS Kota Palembang; Kurang/belum tersedianya data/publikasi yang sesuai kebutuhan konsumen data sehingga memberikan pemahaman kepada konsumen data tentang layanan statistik yang ada di PST.
5. Salah satu dampak pandemi covid-19, kegiatan statistik sektoral/khusus yang dilaksanakan oleh dinas/instansi pada tahun sebelumnya tidak dilaksanakan lagi pada tahun ini sehingga BPS Kota Palembang mencari informasi kembali terkait kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh dinas/instansi.

6. Perencanaan yang telah dilaksanakan belum dapat sepenuhnya dijalankan sehingga masih terdapat perubahan pada target yang telah ditetapkan. BPS Kota Palembang melaksanakan review terhadap target yang telah ditetapkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik.

3.5 Prestasi dan Inovasi BPS Kota Palembang Tahun 2022

Pada tahun 2022 beberapa prestasi yang diperoleh BPS Kota Palembang yaitu:

1. Dalam rangka mewujudkan unit kerja/satuan kerja yang bersih dan bebas dari praktek KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, BPS Kota Palembang berhasil memperoleh penghargaan sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2022.

Gambar 12. Piagam Penghargaan Sebagai Satuan Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Berdasarkan Hasil Tes Penilai Internal 2022



2. Sesuai dengan surat dengan kepala BPS tanggal 27 Desember 2022 tentang Hasil Penilaian *Desk Evaluation* Implementasi SAKIP Tahun 2022 Inspektorat Wilayah I bahwa BPS Kota Palembang memperoleh nilai SAKIP dengan nilai 69,96 poin.

Gambar 13. Hasil Penilaian *Desk Evaluation* Implementasi SAKIP Tahun 2022 Inspektorat Wilayah I



BADAN PUSAT STATISTIK
PROSEDUR KEBARUHAN PELAYANAN

Alamat : KEMENTERIAN PERKOTAHAN DAN INFRASTRUKTUR
Divisi : Bina
Layanan : 1 (teknis)
Hal : Hasil Penilaian Pelaksanaan SAKIP
RPP Kabupaten/Kota Tahun 2022

Yth. Kepala BPS Kabupaten/Kota Golindo
di
Tempat

Sesuai dengan amanat Permenn PANRB No. 10 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Wilayah I sebagai APF RPP Inspektorat Wilayah I melakukan evaluasi atas pelaksanaan SAKIP pada tahun ke-2 RPP, seluruh rangkaian evaluasi tahun ke-2 untuk tahun ke-2 RPP seluruh Indonesia akan segera dilaksanakan, untuk itu diharapkan bobotnya hal sebagai berikut:

1. Rata-rata hasil evaluasi implementasi SAKIP satuan kerja BPS Provinsi adalah sebesar 77,00%, sehingga RPP Kabupaten/Kota adalah sebesar 80,00%.
2. Hasil evaluasi SAKIP BPS Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: (jika ada sebagai tambahan serta pengisian capaian kinerja untuk indikator kinerja utama pada "Hasil Monev Implementasi SAKIP");
3. Laporan Hasil Monev (LHM) atas pelaksanaan SAKIP yang bersangkutan sudah akan dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah I.
4. RPP Kabupaten/Kota agar mempersiapkan dan melaksanakan capaian LHM tersebut untuk pemantauan dan perbaikan implementasi SAKIP yang akan datang;
5. Apresiasi yang tinggi terhadap seluruh jajaran RPP Kabupaten/Kota atas keuletihan dan kerja keras yang konsisten dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Demikian kami sampaikan, dan permohonan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Inspektorat Wilayah I
Ahmad Jodani

No	Nama Kota	2021		2022	
		Nilai	Peserta	Nilai	Peserta
1200	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur	82,22	B	87,83	CC
1201	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	82,22	B	73,43	BB
1202	UPU KABUPATEN TONGGAL	82,49	U	81,17	U
1203	UPU KABUPATEN LAMPUNG	84,17	U	89,51	UU
1271	RPP Kota Jambi	87,38	R	88,33	R
1272	RPP Kota Pangkal Pinang	87,58	R	78,75	RT
1282	RPP PROVINSI SUMATERA SELATAN	78,22	BB	78,81	BB
1301	RPP Kabupaten Pagar Mungkur	84,28	R	88,87	R
1302	RPP Kabupaten Pagar Mungkur	87,88	R	73,44	RT
1303	BPS Kabupaten Muara Enim	82,22	B	72,61	BB
1304	BPS Kabupaten Lahat	82,22	B	88,33	B
1305	BPS Kabupaten Muara Enim	84,28	R	88,87	R
1306	UPU KABUPATEN PULAU MANGROVE	84,28	U	82,50	UU
1307	BPS Kabupaten Bengkulu	87,28	R	78,83	BB
1308	BPS Kabupaten Bengkulu	84,28	R	88,87	R
1309	UPU KABUPATEN ULUU LUWIS	84,28	U	89,51	UU
1310	BPS Kabupaten Pagar Mungkur	84,28	R	88,87	R
1311	RPP Kota Palembang	87,18	R	71,37	RR
1312	RPP Kota Palembang	86,58	M	89,90	M
1313	RPP Kota Palembang	82,22	B	89,33	B
1372	RPP Kota Pagar Mungkur	82,22	B	88,87	B
1373	RPP Kota Pagar Mungkur	84,28	R	88,87	R
1374	RPP Kota LUBUK LINDING	84,28	M	82,28	MM
1380	BPS Provinsi Sumatera	78,22	BB	73,33	BB
1381	RPP Kabupaten Pangkajene Arange	84,28	R	88,87	R
1382	BPS Kabupaten Pangkajene Arange	84,28	R	88,87	R
1383	BPS Kabupaten Bengkulu Utara	82,22	B	87,33	B
1384	BPS Kabupaten Kaur	82,22	B	87,33	B
1385	UPU KABUPATEN LUBUK LINDING	84,28	UU	88,87	UU
1386	BPS Kabupaten Mukomuko	82,22	B	83,28	B
1387	BPS Kabupaten Lingsib	87,18	R	73,37	RR
1388	UPU KABUPATEN PANGKAJENE ARANG	84,28	UU	88,87	UU
1389	RPP KABUPATEN MUKOMUKO	84,28	M	88,87	M
1371	RPP Kota Bengkulu	81,77	R	78,17	RR
1380	RPP PROVINSI LAMPUNG	74,17	BB	78,21	BB

3. Dalam rangka Rapat Koordinasi Daerah *Long Form* SP2020 BPS Provinsi Sumatera Selatan memberikan penghargaan kepada BPS Kota Palembang atas prestasinya selama tahun 2021-2022.

Gambar 14. Piagam Penghargaan Sebagai Kabupaten/Kota Terbaik Kedua



Gambar 15. Piagam Penghargaan Pengelolaan Website Terbaik



Gambar 16. Piagam Penghargaan Peringkat Kedua Penyedia Data Nerwilis Ter-Cetar (Cepat, Tepat, dan Akurat)



Gambar 17. Piagam Penghargaan Peringkat Keempat Producer Terbaik Tahun 2021



4. Pada Lomba Hari Statistik Nasional 2022 di BPS Propinsi Sumatera Selatan memberikan penghargaan kepada BPS Kota Palembang atas prestasinya.

Gambar 18. Juara 3 *Agriculture Room* Terbaik



Gambar 19. Terbaik Pertama UMK Awards



Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan Rapat Zona Integritas dalam agenda pembuatan inovasi di BPS Kota Palembang. Inovasi yang telah dibangun, yaitu:

1. Inovasi WhatsApp Bot: Pelayanan Statistik Via Whatsapp yaitu permintaan data, konsultasi statistik, Info Statistik Terkini, dan *Whistle Blower*.
2. Link: <https://sites.google.com/view/satu-bpskotapalembang/> berisi semua data di BPS Kota Palembang yang berisi RKAKL/POK, LKKA-CS, Matriks DL, Matriks Beban Kerja, Dokumentasi Kegiatan, Nota Dinas, Link Aplikasi Monev Bappenas, Monev Smart, si Monev BPS, Form Rencana Aksi dan Musi.
3. Sistem Monitoring Mitra BPS Kota Palembang dengan alamat link: <http://s.bps.go.id/penilaianmitra1671>.
4. Selain melalui media internet, inovasi layanan statistik secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu Pojok Statistik di Mall Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Palembang.

Gambar 20. Pojok Statistik di Mall Pelayanan Publik Kota Palembang



3.6 Kegiatan Prioritas BPS Kota Palembang Tahun 2022

3.6.1. *Long Form* Sensus Penduduk 2020

Sebagai lanjutan dari pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP 2020) yang telah dilaksanakan pada Bulan September Tahun 2020 lalu, BPS melaksanakan Sensus Penduduk *Long Form* (SPLF) pada Tahun 2022. Sebelum pelaksanaan SPLF, terlebih dahulu telah dilakukan kegiatan pra-pemutakhiran untuk memberikan gambaran kondisi lapangan sehingga pelaksanaan SPLF pada tahun 2022 dapat berjalan lancar dan tanpa kendala, terutama ditengah pandemi Covid-19 yang tidak menentu.

Untuk menjamin pendataan tetap dapat dilakukan, perlu adanya penyempurnaan moda pengumpulan data *Long Form* SP2020 menyesuaikan dengan keadaan yang memperhatikan keselamatan petugas dan masyarakat terkait pandemi COVID-19. Moda pengumpulan data yang dirancang digunakan sebelumnya merupakan metode pendataan secara tatap muka dengan moda CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*) untuk wilayah Kota Palembang. Proses bisnis pendataan yang meminimalisir pendataan tatap muka perlu dikembangkan dengan penambahan moda non tatap muka sebagai mitigasi, yaitu dengan menggunakan *Computer Assisted Telephone Interviewing* (CATI) maupun *Computer Aided Web Interviewing* (CAWI). Penambahan moda ini diharapkan dapat meningkatkan *response rate* masyarakat dalam berpartisipasi pada *Long Form* SP2020 di masa pandemi.

Jumlah sampel Blok Sensus LF SP2020 di Kota Palembang sebesar 1.026 Blok Sensus yang terbagi di dalam 18 Kecamatan dan 107 kelurahan. Dengan target sampel per BS sebanyak 16 rumah tangga, maka target sampel LFSP2020 BPS Kota Palembang adalah sebanyak 16.416 rumah tangga.

Petugas lapangan terdiri dari Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), Koordinator Tim (Kortim), dan Petugas Pendataan Lapangan (PPL). Koseka bertanggung jawab mengawasi seluruh tim pendataan *long form* SP2020 di wilayah tugasnya. Organisasi lapangan pendataan *long form* SP2020 adalah sebagai berikut:

1 (satu) orang Koseka akan membawahi sekitar 3 (tiga) orang Kortim. Koseka dapat bekerja lintas kecamatan. Koseka diutamakan pegawai organik BPS yang ditugaskan menangani di kecamatan sampel.

1 (satu) orang Kortim akan membawahi sekitar 3 (tiga) orang PPL. Kortim merupakan pegawai BPS atau mitra yang berpengalaman dalam kegiatan sensus/survei.

1 (satu) PPL bertugas pada sekitar 5 (lima) BS. Masing-masing BS terdiri dari 16 rumah tangga sampel.

BPS Kota Palembang sendiri membutuhkan 23 orang Koseka, 79 Kortim, dan 293 PPL untuk menjalankan kegiatan LF-SP2020. Koseka yang dipilih untuk bertugas adalah staf fungsi dan Penanggung Jawab Kecamatan di BPS Kota Palembang. Sementara itu, untuk Kortim dan PPL dipilih dari mitra melalui proses rekrutmen.

Tabel 22. Jadwal Kegiatan *Long Form* Sensus Penduduk 2020

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Semula
(1)	(2)	(3)
Persiapan		
1	Pelatihan Instruktur Daerah	21 Maret – 2 April 2022
2	Rekrutmen Petugas (Koseka, Kortim, PPL)	21 Februari – 31 Maret 2022
3	Pelatihan petugas (Koseka, Kortim, PPL)	10 April – 14 Mei 2022
Pelaksanaan Lapangan		
4	Pemutakhiran daftar penduduk	15 – 31 Mei 2022
5	Penjaminan Kualitas Pemutakhiran	19 – 24 Mei 2022
6	Tindak lanjut PK pemutakhiran	23 – 31 Mei 2022
7	Entri daftar penduduk hasil pemutakhiran	20 Mei – 8 Juni 2022
8	Penarikan sampel rumah tangga	20 Mei – 8 Juni 2022
9	Pendataan rumah tangga sampel	1 – 30 Juni 2022
10	Pemeriksaan hasil pendataan oleh Kortim	1 – 30 Juni 2022
11	Verifikasi maternal oleh Kortim	1 – 30 Juni 2022
12	Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Lapangan	15 Mei – 30 Juni 2022
13	Penjaminan kualitas pendataan ruta sampel	6 – 14 Juni 2022
14	Tindak lanjut PK pedataan ruta sampel	13 – 22 Juni 2022
15	Pelaporan BPS Daerah terkait kegiatan PK	22 Juni – 8 Juli 2022

REKRUTMEN PETUGAS

Rekrutmen petugas didasarkan pada alokasi beban tugas dan lokasi blok sensus sampel. Berdasarkan Surat Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Nomor: B69/16000/SS.100/01/2022 tanggal 21 Januari 2021 tentang Persiapan Kegiatan *Long Form* SP2020 TA 2022 dijelaskan bahwa beban tugas masing-masing PPL ialah sebanyak 5 blok sensus. Setiap Kortim akan mengawasi 3 PPL dan Koseka membawahi sebanyak 3

Kortim. Adapun alokasi jumlah kebutuhan petugas *Long Form* SP2020 BPS Kota Palembang berdasarkan surat tersebut dibagi per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 23. Alokasi Petugas *Long Form* SP2020 Kota Palembang per Kecamatan

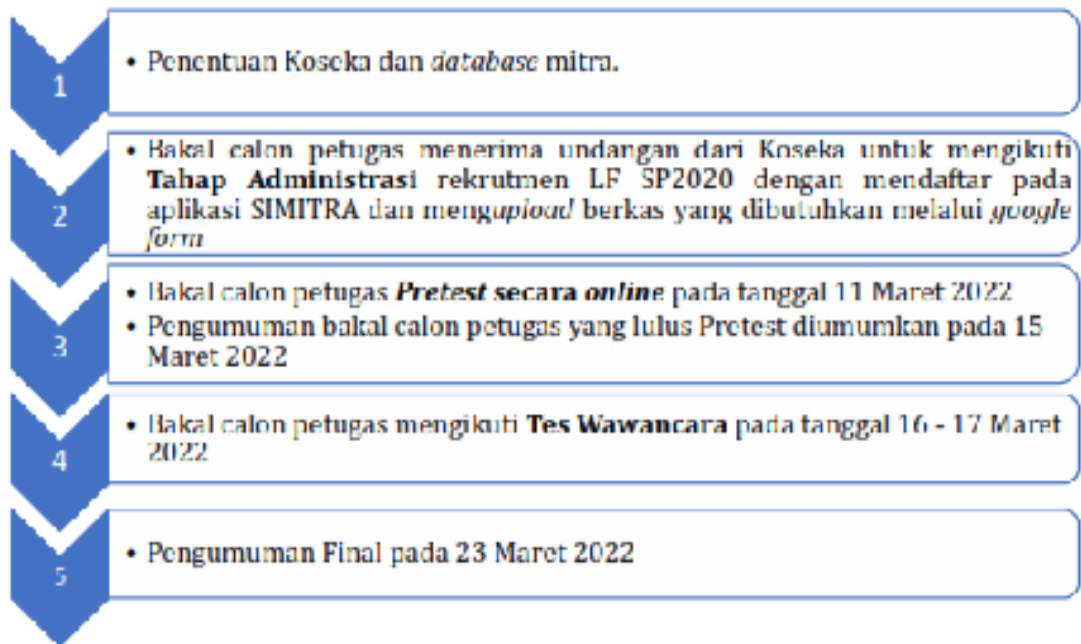
Kecamatan	Jumlah PPL	Jumlah Kortim	Total Petugas
(1)	(2)	(3)	(4)
(1671010) ILIR BARAT DUA	9	3	1
(1671011) GANDUS	10	4	2
(1671020) SEBERANG ULU SATU	12	4	2
(1671021) KERTAPATI	13	5	2
(1671022) JAKABARING	12	4	2
(1671030) SEBERANG ULU DUA	13	5	2
(1671031) PLAJU	13	5	1
(1671040) ILIR BARAT SATU	16	6	2
(1671041) BUKIT KECIL	5	2	1
(1671050) ILIR TIMUR SATU	9	3	1
(1671051) KEMUNING	10	4	2
(1671060) ILIR TIMUR DUA	11	4	2
(1671061) KALIDONI	16	6	2
(1671062) ILIR TIMUR TIGA	9	3	1
(1671070) SAKO	14	5	2
(1671071) SEMATANG HORANG	7	3	1
(1671080) SUKARAMI	22	8	3
(1671081) ALANG - ALANG LEBAR	13	5	2
Kota Palembang	214	79	31

Dikarenakan BPS Kota Palembang adalah wilayah pendataan CAPI maka Kortim maupun PPL harus mampu mengoperasikan *tablet/smartphone* dan aplikasinya dengan baik. Kortim maupun PPL juga disyaratkan memiliki/menguasai *tablet/smartphone* dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:

1. Menggunakan *Operating System Android* dengan versi minimal 4.4.2. (Kitkat).
2. Ukuran layar minimal 4.5 inch;
3. *Processor Quadcore* 1,2 GHz;
4. Memiliki memori *system* (RAM) minimal 2 GB;
5. Memiliki memori internal minimal tersisa 1 GB;
6. Dapat terkoneksi dengan internet baik melalui wifi atau jaringan 2G/3G/4G/LTE.

Rekrutmen petugas *Long Form* Sensus Penduduk (SP2020) di BPS Kota Palembang dilaksanakan mulai tanggal 2 – 23 Maret 2022.

Gambar 21. Tahapan Rekrutmen Petugas *Long Form* Sensus Penduduk 2020



Pengumuman petugas PPLF-SP2020 dilakukan secara resmi melalui nota dinas Kepala BPS Kota Palembang. Bagi peserta yang terpilih, selanjutnya dimasukkan ke dalam WhatsApp grup petugas untuk mempermudah penyaluran informasi terkait kegiatan LF-SP2020. Peserta akhir yang terpilih adalah sebanyak 108 orang mitra sebagai PPL, 6 orang mitra sebagai kortim, 16 orang KSK sebagai kortim, 2 orang KSK sebagai Koseka, dan 3 orang staf fungsi statistik sosial sebagai Koseka. Pelaksanaan pra pemutakhiran LF-SP2020 yang seharusnya dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 tertunda karena pengalokasian wilayah tugas petugas melalui CAPI belum bisa dilakukan.

PELATIHAN PETUGAS LAPANGAN

Tujuan umum dari pelaksanaan Pelatihan Petugas *Long Form* SP2020 adalah memberikan pemahaman terkait proses bisnis *Long Form* SP2020 yang mengalami penyesuaian karena adanya pandemi Covid-19. Selain itu, memberikan pemahaman dan kesamaan persepsi tentang konsep dan definisi yang digunakan dalam *Long Form* SP2020. Tujuan khusus yang ingin dicapai dari pelaksanaan pelatihan Petugas Lapangan *Long Form* SP2020 adalah agar petugas memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal berikut ini:

- 1) Manajemen dan organisasi lapangan pendataan *long form* SP2020;
- 2) Metodologi pendataan *long form* (SP2020-C2);
- 3) Konsep dan definisi yang terdapat pada *long form* (SP2020-C2);
- 4) Alur pertanyaan pada *long form* (SP2020-C2) dengan tepat;
- 5) Penggunaan aplikasi pada pendataan *long form*;
- 6) Tata cara pengisian kuesioner yang digunakan pada pendataan *long form* SP2020;
- 7) Pemeriksaan isian *long form* (SP2020-C2) dengan tepat; dan
- 8) Wawancara yang baik terhadap responden.

Pelatihan petugas lapangan *Long Form* SP2020 Kota Palembang dilaksanakan secara tatap muka selama 4 hari efektif dengan sistem *fullboard* di Hotel The Alts Palembang. Pelatihan petugas dilaksanakan dalam 2 gelombang, dengan 6 kelas di setiap gelombangnya. Masing-masing kelas terdiri dari 2 Instruktur Daerah (Inda), yakni 1 orang Inda Instrumen dan 1 orang Inda IT (dibantu dengan Inda dari BPS Provinsi Sumatera Selatan).

Gambar 22. Dokumentasi Pelatihan Petugas *Long Form* SP2020



PEMUTAKHIRAN RUMAH TANGGA *LONG FORM* SP2020

Pelaksanaan pemutakhiran blok sensus dilakukan oleh PCL dan diawasi PML telah dilaksanakan sesuai dengan skema pada gambar 3.1. Petugas mengunjungi rumah tangga-rumah tangga di dalam Blok Sensus terpilih secara *door to door* dengan moda PAPI menggunakan kuesioner LFSP2020.P dan peta WB.

Beberapa kendala dirasakan petugas ketika melakukan pemutakhiran, antara lain:

- 1) Penduduk perkotaan terutama di perumahan sulit ditemui di pagi dan siang hari karena bekerja dan rumah dalam keadaan kosong.
- 2) Penduduk pedesaan yang mayoritas bekerja sebagai petani, tidak bisa ditemui pada pagi hari karena sebagian besar pergi menyadap karet atau ke sawah.
- 3) Penolakan penduduk yang merasa sudah sering didata.
- 4) Muatan BS yang sangat besar sehingga sulit untuk memenuhi target penyelesaian.

Namun demikian, kendala-kendala tersebut berhasil diatasi dan pemutakhiran berjalan tepat waktu. Strategi pengaturan jadwal dilakukan petugas agar dapat bertemu dengan responden yang sulit ditemui. Penolakan penduduk berhasil dilalui dengan bantuan aparat RT/RW/desa setempat. Selain itu, untuk BS dengan muatan yang cukup besar, maka dibentuk tim khusus yang terdiri dari petugas-petugas yang telah selesai lapangan untuk membantu menyelesaikan pemutakhiran di wilayah bermuatan besar tersebut.

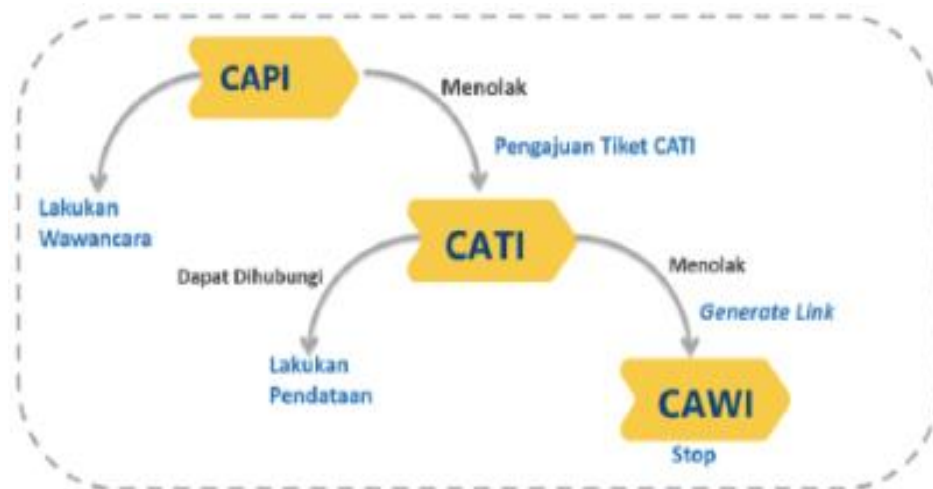
Gambar 23. Dokumentasi Pemutakhiran Rumah Tangga *Long Form* SP2020



PENDATAAN *LONG FORM* SP2020


Pendataan wilayah CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*) dilakukan semaksimal mungkin wawancara secara tatap muka. Jika responden tidak bersedia atau menolak didata secara tatap muka, maka responden akan diwawancara dengan metode CATI (*Computer Assisted Telephone Interviewing*) atau melakukan pengisian mandiri melalui CAWI (*Computer Aided Web Interviewing*).

Gambar 24. Skema Pendataan SP2020-C2 Wilayah CAPI



PENCACAHAN RUMAH TANGGA SAMPEL

Pencacahan sampel rumah tangga ini dijadwalkan pada tanggal 1 – 30 Juni 2022, dengan moda CAPI. Dalam pelaksanaannya, pencacahan *Long Form* SP2020 mengikuti skema 313 yang diinisiasi oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan. Adapun skema 313 yang dimaksud ialah pencacahan selama 3 hari, lalu *off* 1 hari, kemudian dilakukan pencacahan lagi selama 3 hari, lalu *off* 1 hari, dst. PPL melakukan pencacahan maksimal 6 ruta per hari. Pembatasan ini bertujuan untuk meminimalisir informasi yang terlalu banyak masuk dan petugas dapat langsung mengedit dokumen pada hari yang sama, sehingga tidak menumpuk dokumen. Pada hari *off*, maka petugas difokuskan untuk melakukan *cleaning* dokumen yang telah dicacah, pemeriksaan dokumen oleh Kortim, dan penyerahan dokumen yang sudah diperiksa Kortim ke BPS Kab/Kota.



Strategi pencacahan perlu dirancang dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan lapangan, antara lain bagaimana menemukan lokasi ruta sampel, bagaimana mengatur waktu dengan responden yang harus diwawancarai, bagaimana etika dan teknis berwawancara yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah sampel, dan lain-lain.

Namun demikian, pendataan dengan moda CAPI memiliki kendala tersendiri bagi petugas. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain:

- 1) Aplikasi yang berubah dari pelatihan petugas. Pada pelatihan petugas, aplikasi yang digunakan adalah ICS-Pro. Namun, seiring berjalannya waktu, aplikasi diganti menjadi FASIH. Tampilan dan beberapa penjelasan pada buku pedoman tidak sesuai dengan aplikasi FASIH yang baru.
- 2) Proses *assignment* BS ke aplikasi petugas dilakukan terpusat oleh BPS RI, sehingga memakan waktu untuk menunggu proses *assignment* tersebut. Sehingga, seluruh petugas baru mendapat *assignment* per 2 Juni 2022 pagi. Maka, pada tanggal 1 Juni 2022, petugas masih berjalan dengan menggunakan kuesioner C2 yang diperbanyak oleh kantor.
- 3) *Error* pada aplikasi FASIH :
 - a. Pada awal pendataan, proses *approval* atau *rejection* oleh Kortim tidak bisa dilakukan. Data yang sudah di-*approve* Kortim bahkan kembali ke posisi *Open* di aplikasi PPL. Hal ini menyebabkan proses pemeriksaan yang dilakukan Kortim menjadi terkendala.
 - b. Pada beberapa HP terjadi *error* untuk beberapa pertanyaan. Misalnya pada beberapa HP, aplikasi menjadi *forced close* ketika akan memilih "suku", status Mertua error dan hanya boleh jika KRT berstatus kawin, padahal isian pada KRT memang sudah berstatus kawin, proses *upload* data oleh PPL tidak berjalan (status *pending* dalam waktu lama) padahal sinyal internet lancar, proses *approval* dan *reject* oleh Kortim dan Kortim sering gagal karena server *crowded*.
 - c. Kendala juga dialami oleh Kortim dimana sebagian besar data yang sudah disubmit, hanya muncul Blok I dan Catatan sehingga Kortim tidak bisa memeriksa/*mereject*/*approve*.
 - d. Catatan-catatan yang dibuat oleh Kortim untuk diperbaiki atau dikonfirmasi tidak muncul di aplikasi PPL.

- e. Koseka tidak bisa memberi catatan pada aplikasi, sehingga proses pemeriksaan harus dilakukan manual dengan menghubungi petugas langsung terkait kesalahan yang harus diperbaiki.
- f. Data yang sudah dientri PPL hilang.
- g. Beberapa rincian pertanyaan lanjutan tidak muncul.
- h. Pendataan dengan aplikasi FASIH berjalan lamban karena proses *loading* ketika sinkronisasi, pindah dari 1 pertanyaan ke pertanyaan berikutnya, dan ketika pindah antar halaman sangat memakan waktu.

Gambar 25. Dokumentasi Pencacahan Rumah Tangga *Long Form* SP2020





VERIFIKASI KEMATIAN

Kuesioner SP2020-V bertujuan untuk mendapatkan informasi kejadian kematian ibu. Kortim melakukan pemeriksaan kuesioner SP2020-C2 (CAPI) dari data yang dikirim oleh PPL. Beberapa pertanyaan secara *prefilled* akan terisi dari hasil isian kuesioner SP2020-C2 (CAPI). Apabila ada indikasi kematian maternal maka Kortim mengunjungi rumah tangga tersebut untuk melakukan verifikasi. Keterangan yang diverifikasi adalah informasi mengenai siapa yang meninggal, umur ketika meninggal, bulan dan tahun lahir, bulan dan tahun meninggal, apakah meninggal pada masa kehamilan, masa keguguran/pengguguran, saat persalinan, masa dua bulan setelah persalinan/keguguran/pengguguran, tempat meninggal, dan sebab meninggal perempuan berumur 10-54 tahun.

PEMERIKSAAN, PENGAWASAN, DAN SUPERVISI

Data *Long Form* SP2020 akan menghasilkan indikator-indikator strategis yang penting bagi pengambilan kebijakan. Maka untuk menjaga kualitas data, pemeriksaan dan pengawasan oleh Kortim dilakukan dengan maksimal, bahkan supervisi juga dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan, Kepala BPS Kota Palembang, bahkan Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Pelaksanaan pengawasan *Long Form* SP2020 dilaksanakan pada saat pemutakhiran dan pencacahan rumah tangga dengan mengikuti SOP yang ada. Pada saat pengawasan pemutakhiran, Kortim mendampingi pencacah dalam memastikan batas blok sensus di peta dan kondisi lapangan. Selanjutnya, Kortim mendampingi pemutakhiran dengan memastikan petugas sudah melakukan *probing* dengan tepat. Setelah pemutakhiran selesai, Kortim melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemutakhiran. Kemudian PML mendampingi PPL terutama diawal pencacahan untuk mendeteksi dini kesalahan yang dilakukan PPL sehingga dapat langsung diperbaiki.

Sementara itu, pengawasan lapangan yang dilakukan, baik oleh PML, Koseka, maupun *supervisor*, bertujuan untuk memastikan kebenaran SOP yang dijalankan serta mengevaluasi pendataan yang dilakukan petugas di lapangan



Gambar 26. Dokumentasi Pengawasan dan Supervisi Pencacahan Rumah Tangga
Long Form SP2020



MONITORING DAN EVALUASI

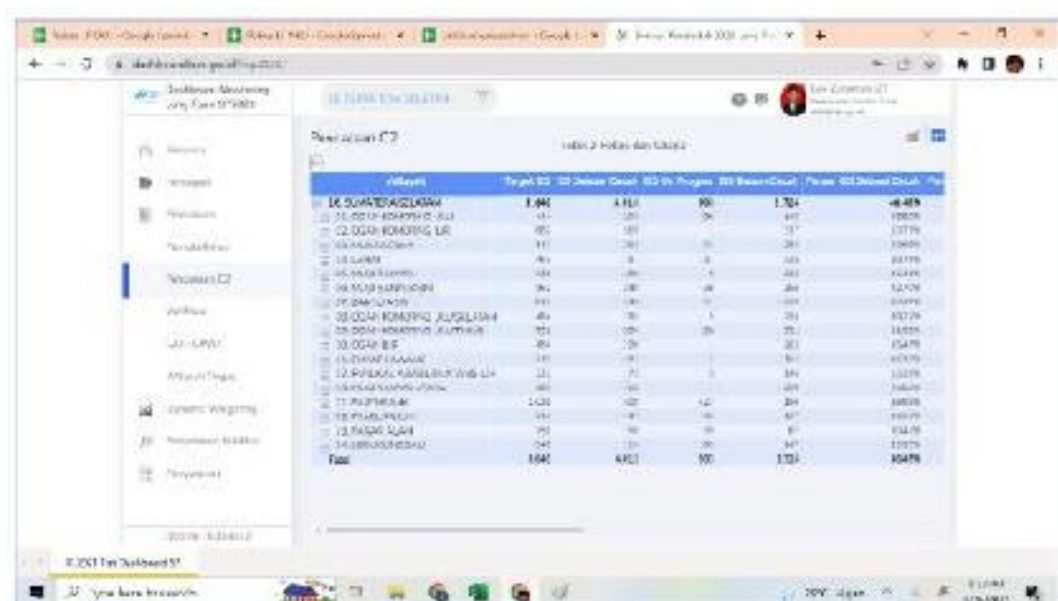
Pelaksanaan monitoring selain berdasarkan dashboard monitoring dari BPS RI melalui <https://dashboard.bps.go.id> dan <https://webmonitoring.bps.go.id>, BPS Kota Palembang juga melakukan monitoring melalui website <https://s.bps.go.id/musi> yang datanya diperoleh dari laporan Telegram petugas lapangan. Pelaporan telegram ini bertujuan untuk memonitor jalannya system 3-1-3 oleh petugas lapangan. Target harian yang diberikan kepada petugas akan dimonitor, sehingga kinerja petugas dapat dievaluasi.

Pelaporan telegram yang dilakukan oleh PPL dilakukan untuk seluruh rumah tangga yang telah dicacah. Pelaporan tersebut meliputi :


- Nama kepala rumah tangga
- Nomor urut sampel rumah tangga
- Jumlah anggota rumah tangga laki-laki dan perempuan
- Jumlah kematian dalam 5 tahun terakhir

Pelaporan juga dilakukan oleh Kortim dan Koseka terkait jumlah rumah tangga per BS yang sudah diterima atau sudah diupload oleh PPL.

Gambar 27. Monitoring Melalui Dashboard dan Pelaporan Telegram
Long Form SP2020



Kategori	Target	Dilaksanakan	Dilaksanakan Program	Dilaksanakan Cetak	Persepsi Dilaksanakan Cetak
16.004.001.001.001	1.000	4.100	100	1.700	48%
16.004.001.001.002	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.003	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.004	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.005	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.006	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.007	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.008	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.009	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.010	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.011	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.012	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.013	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.014	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.015	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.016	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.017	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.018	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.019	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.020	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.021	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.022	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.023	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.024	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.025	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.026	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.027	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.028	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.029	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.030	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.031	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.032	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.033	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.034	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.035	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.036	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.037	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.038	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.039	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.040	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.041	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.042	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.043	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.044	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.045	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.046	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.047	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.048	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.049	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.050	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.051	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.052	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.053	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.054	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.055	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.056	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.057	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.058	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.059	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.060	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.061	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.062	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.063	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.064	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.065	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.066	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.067	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.068	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.069	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.070	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.071	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.072	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.073	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.074	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.075	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.076	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.077	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.078	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.079	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.080	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.081	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.082	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.083	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.084	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.085	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.086	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.087	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.088	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.089	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.090	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.091	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.092	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.093	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.094	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.095	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.096	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.097	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.098	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.099	1.000	1.000	100	1.000	100%
16.004.001.001.100	1.000	1.000	100	1.000	100%
Total	1.000	4.100	100	1.700	48%

- 
1. Memperbaiki metode pengumpulan data menjadi lebih obyektif dan modern dengan melibatkan peranan teknologi didalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu;
 2. Merupakan tindak lanjut pengembangan dan perbaikan dari kegiatan uji coba sebelumnya yakni Uji Coba Kerangka Sampel Area (KSA) di Kabupaten Indramayu dan Garut pada tahun 2015, dan kegiatan pengumpulan data statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan metode kerangka sampel area (KSA) di Pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta di tahun 2017.

Jumlah petugas yang terlibat dalam kegiatan Survei KSA 2022 di Kota Palembang adalah 6 PCS dan 2 PMS. Petugas Survei KSA 2022 menggunakan mitra BPS terbaik yang berpengalaman dan telah sering mengikuti kegiatan BPS

Target alokasi segmen untuk KSA Padi Kota Palembang adalah sebanyak 25 segmen per bulan atau 300 segmen selama tahun 2022 (Januari s.d. Desember) dan seluruhnya terealisasi. Target alokasi segmen untuk KSA Jagung Kota Palembang sebanyak 16 segmen per bulan atau 144 segmen selama tahun 2022 (Januari s.d. Desember). Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa Angka Luas Panen dan Produksi Padi.

Kendala:


Selama pelaksanaan kegiatan Survei KSA Padi adalah kesulitan untuk menuju lokasi segmen yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak mendukung seperti hujan dan geografis yang sulit dijangkau. Selain itu, HP Petugas memorinya penuh sehingga ketika proses pengambilan foto amatan menjadi lambat.

Tindak Lanjut :

Kedepan petugas sebaiknya dibekali dengan asuransi jiwa mengingat lokasi segmen yang berbahaya dan mengancam jiwa.

3.6.3. Survei Ubinan Tanaman Pangan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu subsektor pertanian yang mempunyai peranan yang sangat strategis adalah subsektor tanaman pangan, yang meliputi tanaman



padi dan palawija. Peranan penting subsektor tanaman pangan adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

Mengingat pentingnya peran subsektor tanaman pangan, dibutuhkan informasi mengenai produksi tanaman pangan yang akurat dan menggambarkan kondisi terkini. Salah satu informasi penting adalah hasil per hektar (produktivitas) yang dikumpulkan secara rutin setiap subround melalui Survei Ubinan Tanaman Pangan.

Tujuan dari pelaksanaan Survei tanaman pangan adalah sebagai berikut:


1. Memperoleh informasi mengenai produktivitas (hasil per hektar) komoditas tanaman pangan (padi dan palawija);
2. Memperoleh informasi pendukung lainnya, seperti koordinat lokasi ubinan, cara penanaman, system penanaman jajar legowo (khusus padi), penggunaan pupuk, penanggulangan OPT, dan lain-lain.

Periode pelaksanaan survei ubinan tanaman pangan tahun 2022 terbagi sebagai berikut:

1. Untuk Sampel Ubinan Padi berbasis KSA dilakukan selama rentang bulan Januari s.d. Desember 2022 (Subround I s.d. III tahun 2022)
2. Untuk Sampel Ubinan yang berasal dari hasil pemutakhiran terbagi menjadi 3 periode, yaitu :

Subround	Pemutakhiran Rumah Tangga
Januari-April (I)	Desember (2021)
Mei-Agustus (II)	April (2021)
September-Desember (III)	Agustus (2021)

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa Angka Produktivitas Padi dan Palawija yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan melalui hasil rapat pertemuan Angka Tetap (ATAP).



Pencacahan Survei Ubinan Tanaman Pangan dilakukan dengan langsung melakukan ubinan pada segmen plot yang telah ditentukan titik koordinatnya pada daftar sampel (SUB-KSA.DS) untuk Ubinan yang berbasis KSA selama rentang Januari s.d. Desember (Subround I s.d. Subround III tahun 2022) dan melakukan pemutakhiran daftar rumah tangga untuk Ubinan yang dilakukan pemutakhiran, yaitu menggunakan kuesioner SUB-P berdasarkan sampel Blok Sensus yang telah ditentukan oleh BPS RI dan dengan panduan peta WB agar tidak ada yang terlewat cacah atau *double* cacah. PCS beserta PMS mengunjungi rumah tangga sekaligus mengidentifikasi rumah tangga yang melakukan budi daya tanaman pangan padi atau palawija dan akan melakukan panen pada subround berjalan.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa Angka Produktivitas Padi dan Palawija yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan melalui AngkaTetap. Untuk Ubinan Padi berbasis KSA tidak terealisasi sebanyak 7 plot, dikarenakan gagal dan lewat panen. Untuk Ubinan Palawija tidak terealisasi sebanyak 4 plot di subround III karena memang tidak ada rumah tangga yang melakukan tanam untuk komoditas yang tidak terpenuhi. Ubinan padi pada umumnya system pemanenannya sudah memakai alsintan seperti *combain*, sehingga petugas ubinan harus memantau kapan panen setiap plot dan meminta no hp masing masing petani agar mudah memantaunya. Kedepan petugas dapat melakukan koordinasi intensif dengan responden sehingga jadwal panen dapat dipantau.

3.6.4. Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Reformasi sistem perlindungan sosial diperlukan untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga Negara berdasarkan kerentanan agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi bencana. Terdapat enam prasyarat dalam reformasi sistem perlindungan sosial dan yang terutama adalah transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi (Regsosek) seluruh penduduk.

Rangkaian kegiatan Regsosek diawali dengan pendataan awal, yaitu pengumpulan data seluruh penduduk. Tujuannya adalah untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan.

REKRUTMEN PETUGAS LAPANGAN

Rekrutmen petugas lapangan pendataan awal Regsosek TA 2022 BPS Kota Palembang dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai dengan 22 September 2022. Pelaksanaan rekrutmen calon petugas ini melalui dua tahap, yaitu tahap administrasi, berupa pendaftaran secara online melalui website mitra.bps.go.id dan melengkapi berkas, serta tahap wawancara yang bertempat di Kantor BPS Kota Palembang. Hasil akhir diumumkan pada tanggal 22 September 2022 dengan mengirimkan *e-mail* pemberitahuan kepada para calon petugas dan aplikasi SOBAT. Dari 2.920 peserta yang mendaftar, 2.412 peserta yang memenuhi kualifikasi diterima, 396 peserta ditolak, dan 112 peserta mengundurkan diri.

Tabel 24. Alokasi Jumlah Petugas Pendataan Awal Regsosek Menurut Kecamatan Kota Palembang

No	Kecamatan	Jumlah Petugas			
		PPL	PML	Koseka	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ili Barat Dua	71	16	1	88
2	Gandus	102	24	2	128
3	Seberang Ulu Satu	98	23	2	123
4	Kertapati	115	27	2	144
5	Jakabaring	102	24	2	128
6	Seberang Ulu Dua	112	23	2	140
7	Plaju	109	25	2	136
8	Ili Barat Satu	152	35	3	190
9	Bukitkecil	49	11	1	61
10	Ili Timur Satu	74	17	1	92
11	Kemuning	97	22	2	121
12	Ili Timur Dua	96	22	2	120
13	Kalidoni	154	36	3	193
14	Ili Timur Tiga	86	20	2	108
15	Sako	121	28	2	151
16	Sematangborang	67	13	1	84
17	Sukarami	215	50	4	269
18	Alang-Alang Lebar	136	31	2	169
Kota Palembang		1958	453	38	2449

PELATIHAN PETUGAS PENDATAAN

Pelaksanaan pelatihan petugas Regsosek 2022 di BPS Kota Palembang dilakukan secara tatap muka di Hotel Beston dan Hotel 101 Palembang. Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak enam gelombang dengan dua hari efektif mulai tanggal 28 September 2022 sampai 11 Oktober 2022 dengan jumlah kelas sebanyak 98 kelas.

Gambar 28. Dokumentasi Pelatihan Calon Petugas Pendataan



PENDATAAN LAPANGAN

Secara garis besar kegiatan lapangan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan lapangan, verifikasi keberadaan keluarga, dan pendataan keluarga. Kegiatan pendataan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober – 14 November 2022.

Pendataan pendataan awal Regsosek menyediakan basis data awal sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia, termasuk yang tinggal di wilayah khusus, seperti panti sosial dan Lembaga Permasayarakatan.

Tanggal 29-30 Oktober 2022 dilaksanakan Malam Regsosek untuk menjaring penduduk tunawisma dan pendataan awak kapan berbendera Indonesia.

Gambar 29. Dokumentasi Pendataan Lapangan Regsosek 2022



MONITORING DAN EVALUASI

Pengaawasan dan pemeriksaan lapangan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan Pendataan Awal Regsosek telah dilaksanakan sesuai SOP. Untuk melihat perkembangan pendataan lapangan, penanggung jawab kegiatan di setiap level dapat melihat perkembangan jumlah keluarga yang sudah didata oleh PPL melalui <http://dashboard.bps.go.id/regsosek2022>.

MONITORING KUALITAS

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas data Regsosek, BPS merujuk pada Kerangka Penjaminan Kualitas Nasional (*National Quality Assurance Framework-NQAF*) dari United Nations Statistics Division (UNSD).

Gambar 30. Dokumentasi Monitoring Kualitas Regsosek 2022



MONITORING DAN SUPERVISI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Supervisi pendataan awal Regsosek oleh BPS Kota Palembang dimaksudkan untuk dapat mengevaluasi hal-hal penting, diantaranya pelaksanaan SOP, organisasi lapangan, cara petugas wawancara dan melakukan probing, cara PML melakukan pengawasan, pemeriksaan dokumen, dan mengisikan kode yang diajukan, serta lain sebagainya. Pengawasan dilakukan oleh tim Regsosek pada seluruh tahapan kegiatan pendataan lapangan dan laporan hasil kegiatan terkait hal-hal yang ditemui harus disampaikan kepada Kepala BPS Kota Palembang.

3.7. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2022

3.7.1. Pagu dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Sasaran

Realisasi penggunaan anggaran tahun 2022 setelah dilakukan perubahan anggaran mencapai 99,53 persen terhadap total pagu, dengan rincian yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-tugas Lainnya BPS sebesar 99,77 persen dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik menyerap dana sebesar 99,45 persen terhadap total. Adapun realisasi penggunaan anggaran BPS Kota Palembang selama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25. Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Program Tahun 2022

Program	Pagu 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	7.362.448.000	7.345.683.364	99,77	16.764.636
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	22.508.596.000	22.384.189.956	99,45	124.406.044
Total	29.871.044.000	29.729.873.320	99,53	141.170.680

Apabila ditinjau berdasarkan jenis belanja, dapat terlihat pada Tabel 21 penyerapan anggaran BPS Kota Palembang untuk belanja pegawai (51) sebesar Rp 6.683.386.249,- atau sebesar 99,99 persen dari total pagu anggaran Tahun 2022.. Untuk belanja barang (52) pagu

anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 23.187.182.000,- dan diserap 99,39 persen, yakni sebesar Rp 23.046.487.071,-. Sedangkan untuk belanja modal (53) pagu anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 0,-.

Tabel 26. Penyerapan Anggaran BPS Kota Palembang Dirinci Menurut Jenis Belanja

Program	Pagu 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
Belanja Pegawai	6.683.862.000	6.683.386.249	99,99
Belanja Barang	23.187.182.000	23.046.487.071	99,392
Belanja Modal	0	0	0
Total	29.871.044.000	29.729.873.320	99,53

3.7.2. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Program dan Sasaran

Menteri PANRB mengingatkan bahwa visi besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah mewujudkan Indonesia Maju, dengan menekankan lima sasaran prioritas pembangunan. Salah satunya adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Instansi pemerintah harus berorientasi pada hasil, bukan lagi output. Artinya, pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan, harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran BPS Kota Palembang harus berusaha melalui berbagai upaya, seperti penyempurnaan *cascading* kinerja hingga level individu; penyelesaian target kinerja tingkat pemerintah daerah melalui kolaborasi dengan seluruh OPD atau *cross-cutting* program; monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja untuk mendorong pencapaian kinerja. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima.

Tabel 27. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran BPS Kota Palembang Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2022

Tujuan/Sasaran/Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan nasional	100	22.502.705.000	22.378.303.706	99,45
1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	100	22.502.705.000	22.378.303.706	99,45
2898.BMA.007 Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran		25.195.000	24.065.000	95,51
2899.BMA.006 Publikasi/Laporan Neraca Produksi		13.518.000	12.749.000	94,31
2900.BMA.005 Dokumen, Laporan, dan Publikasi Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei		212.000	0	0,00
2902.BMA.004 Publikasi/Laporan Statistik Distribusi		32.327.000	30.455.000	94,21
2903.BMA.009 Publikasi/Laporan Statistik Harga		1.862.482.000	1.814.354.134	97,42
2904.BMA.006 Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi		139.819.000	138.131.000	98,79
2905.BMA.004 Publikasi/Laporan SAKERNAS		192.289.000	188.335.000	97,94
2905.QMA.006 Publikasi/Laporan Sensus Penduduk		2.547.366.000	2.543.528.492	99,85
2906.BMA.006 Publikasi/Laporan Susenas		323.572.000	317.502.000	98,12
2907.BMA.006 Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial		3.840.000	3.732.600	97,20
2907.QMA.009 Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi		15.842.116.000	15.801.568.480	99,74
2907.BMA.008 Publikasi/Laporan Pendataan Podes		-		



	2907.BMA.008	Publikasi/Laporan Pendataan Podes		-		
	2908.BMA.004	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata		127.519.000	126.870.000	99,49
	2908.QMA.009	Publikasi/Laporan Statistik <i>E-Commerce</i>		19.051.000	16.999.000	89,23
	2909.BMA.005	Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Terbit Tepat Waktu		7.315.000	4.048.000	55,34
	2910.BMA.008	Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura dan Perkebunan		3.851.000	3.166.000	82,21
	2910.QMA.006	Publikasi/Laporan Statistik Sensus Pertanian		1.280.068.000	1.275.836.000	99,67
	2910.QMA.007	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan		25.696.000	22.393.000	87,15
	2910.QMA.010	Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area		56.469.000	54.571.000	96,64
2.	Meningkatnya kolaborasi. integrasi. sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN		110	4.750.000	4.747.000	99,94
	2.1	Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	110	4.750.000	4.747.000	99,94
		2897.BMA.004 Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik		4.750.000	4.747.000	99,94
3.	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN		108,33	1.141.000	1.139.250	99,85
	3.1	Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I	108,33	1.141.000	1.139.250	99,85
		2897.BDB.003 Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		1.141.000	1.139.250	99,85
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi		99,97	7.362.448.000	7.345.683.364	99,77
	4.1	SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	99,97	7.362.448.000	7.345.683.364	99,77
	Seluruh Program Dukungan Manajemen			7.362.448.000	7.345.683.364	99,77
	Total		104,04	29.871.044.000	29.729.873.320	99,53


3.7.3. Upaya Efisiensi di BPS Kota Palembang Tahun 2022

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.

BPS Kota Palembang telah berupaya melakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan cara seminimal mungkin dalam penggunaan anggaran untuk memperoleh hasil yang maksimal. Efisiensi yang telah dilaksanakan BPS Kota Palembang sesuai dengan tujuan dan sasaran seperti terlihat pada Tabel 20.

Tabel 28. Efisiensi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	100	99,45	0,55
	1.1 Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	100	99,45	0,55
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	110	99,85	9,23
	2.1 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	110	99,85	9,23
3	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	108,33	99,94	7,74
	3.1 Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I	108,33	99,94	7,74
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	99,97	99,77	0,20
	4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	99,97	99,77	0,20
	Rata-Rata	104,04	99,53	4,33



Pada Tujuan Pertama “Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” penyerapan anggaran sebesar 99,45 persen terdapat efisiensi sebesar 0,55 persen dengan nilai capaian kinerja 100 persen. Tujuan kedua “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN” yaitu pengumpulan survei kebutuhan data dan metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus telah selesai dilakukan. Penyerapan anggaran sebesar 99,85 persen dengan capaian kinerja sebesar 110 persen dan efisiensi 9,23 persen.

Penyerapan anggaran tujuan ketiga “Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” yaitu sebesar 99,94 dengan capaian kinerja 108,33 persen dan efisiensi sebesar 7,74 persen. Sedangkan penyerapan anggaran pada tujuan ke empat “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” sebesar 99,77 persen dengan capaian kinerja 99,97 persen dan efisiensi 0,20 persen.

Pada tahun 2022 banyak dilakukan revisi anggaran *selfblocking* dengan arahan BPS Pusat. Sehingga banyak kegiatan yang dipangkas, seperti kegiatan Podes, beberapa kegiatan distribusi, dan juga anggaran cetak publikasi. Akan tetapi, pada bulan Oktober ada kegiatan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang menambah pagu BPS Kota Palembang dari pagu awal sebesar Rp 12.866.317.000,- menjadi Rp 29.871.044.000,-.

Berdasarkan arahan BPS RI mengenai penghematan anggaran, di BPS Kota Palembang dilakukan upaya efisiensi anggaran sebagai berikut:

1. perlu disebarakan informasinya cukup dibagikan melalui aplikasi perpesanan. Kegiatan Potensi Desa (Podes) dan beberapa kegiatan distribusi dibatalkan .
2. Paket meeting/FGD, selain pelatihan petugas, sejak Juni 2022 dibatalkan atau dilakukan secara *online*.
3. Perjalanan dinas supervisi/pengawasan dikurangi 50%. Untuk organik BPS Kota Palembang, perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam sangat selektif penganggarnya.
4. Penghematan ATK, *computer supplies, consumable*. Misal, surat-surat dari *e-mail* tidak dicetak, jika Biaya berbagai pemeliharaan pun digunakan seperlunya, kondisi BMN di BPS Kota Palembang banyak yang masih baik sehingga cukup banyak anggaran yang bisa dihemat.

Dengan melakukan berbagai upaya efisiensi seperti di atas ternyata cukup banyak anggaran yang bisa dihemat sehingga potensi sisa anggaran pun cukup banyak.

Pada tahun 2022 BPS Kota Palembang telah melakukan tiga penghematan sesuai instruksi BPS RI sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan terkait *Automatic Adjustment*. Penghematan pertama dilaksanakan pada Desember 2021 dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19. Penghematan kedua dilaksanakan pada Juni 2022 pada belanja di beberapa kegiatan, kecuali pada belanja pegawai dan belanja operasional. Sedangkan penghematan anggaran ketiga dilakukan pada November 2022 sekaligus realokasi *Automatic Adjustment* ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Total penghematan BPS Kota Palembang pada tahun 2022 sebesar Rp765.568.000,- Pada Tabel 18 dapat dilihat potensi penghematan selama tahun 2022.

Tabel 29. Potensi Penghematan Tahun 2022

Kode	Prog/Keg/Output	Pagu Semula	Pagu Menjadi	Potensi Penghematan
2897.BDB.003	Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	1.741.000	1.141.000	600.000
2897.BMA.004	Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik	31.970.000	4.750.000	27.220.000
2897.BMA.007	Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran	28.442.000	25.195.000	3.247.000
2899.BMA.006	Publikasi/Laporan Neraca Produksi	15.743.000	13.518.000	2.225.000
2900.BMA.005	Dokumen, Laporan, dan Publikasi Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	424.000	212.000	212.000
2902.BMA.004	Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	50.860.000	32.327.000	18.533.000
2903.BMA.009	Publikasi/Laporan Statistik Harga	2.116.174.000	1.862.482.000	253.692.000
2904.BMA.006	Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalan, Energi, dan Konstruksi	205.925.000	139.819.000	66.106.000
2905.BMA.004	Publikasi/Laporan SAKERNAS	219.913.000	192.289.000	27.624.000



2905.QMA.006	Publikasi/Laporan Sensus Penduduk	2.656.405.000	2.547.366.000	109.039.000
2906.BMA.006	Publikasi/Laporan SUSENAS	332.472.000	323.572.000	8.900.000
2907.BMA.006	Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	35.323.000	3.840.000	31.483.000
2908.BMA.004	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	146.225.000	127.519.000	18.706.000
2908.QMA.009	Publikasi/Laporan Statistik <i>E-Commerce</i>	19.951.000	10.051.000	900.000
2909.BMA.005	Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Terbit Tepat Waktu	121.430.000	7.315.000	114.115.000
2910.BMA.008	Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura dan Perkebunan	4.340.000	3.851.000	489.000
2910.QMA.006	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	1.354.075.000	1.280.068.000	74.007.000
2910.QMA.007	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan	33.116.000	25.696.000	7.420.000
2910.QMA.010	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area	57.069.000	56.469.000	600.000
2886.EBA.956	Layanan BMN	900.000	450.000	450.000
Total Keseluruhan		7.432.498.000	6.657.930.000	765.568.000

3.8. Kinerja Anggaran Tahun 2022

Kinerja anggaran BPS Kota Palembang 2022 diukur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, menggunakan variabel Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

- a. Sangat baik, apabila nilai IKPA > 95;
- b. Baik, apabila 89 < nilai IKPA < 95;
- c. Cukup, apabila 70 < nilai IKPA < 89; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA

Capaian nilai IKPA 2022 BPS Kota Palembang adalah 94,20, masuk kategori baik. Capaian IKPA merupakan integrasi antara nilai capaian kinerja yang terukur dengan menggunakan kertas kerja Form Rencana Aksi (FRA) dan kertas kerja Capaian Output, yang mengukur seluruh progress monitoring dan evaluasi indikator kinerja berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 38 Tahun 2020 tentang indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, serta kertas kerja kinerja anggaran 2022. Sehingga capaian nilai IKPA 2022 merupakan integrasi kinerja dan anggaran secara utuh. Semakin baik capaian nilai IKPA Satker, maka semakin baik pula kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Satker.

Keterkaitan dan keselarasan antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran akan dicapai secara efisien dan efektivitas dalam pengalokasian anggaran apabila penyerapan anggaran telah sesuai dengan rencana penarikan dana. Konsistensi penyerapan anggaran di BPS Kota Palembang telah dilaksanakan secara baik. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Konsistensi penyerapan anggaran BPS Kota Palembang diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{RPDKn - (RPDKn - RAKn)}{RPDKn}}{N} \times 100\%$$

n = Jumlah bulan

- K = Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- RAK = Realisasi Anggaran kumulatif sampai dengan bulan i
- RPDK = Rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n

Tingkat konsistensi untuk setiap bulan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 30. Konsistensi Rencana Penarikan Dana dan Penyerapan Anggaran Tahun 2021 dan 2022

Bulan	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Rencana Penarikan Dana (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Konsistensi Per Bulan	Rencana Penarikan Dana (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Konsistensi Per Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	397.638.300	397.638.300	100	424.580.000	424.580.000	100
Februari	503.027.288	507.823.471	99,47	952.280.000	952.280.000	100
Maret	516.584.282	528.442.040	98,82	794.785.000	794.785.000	100
April	684.938.318	694.472.061	98,75	2.196.212.000	2.196.212.000	100
Mei	687.370.471	690.929.348	98,93	1.526.537.000	1.526.537.000	100
Juni	684.126.314	689.605.141	98,98	1.471.189.000	1.471.189.000	100
Juli	621.386.924	637.258.427	98,75	2.211.310.000	2.211.310.000	100
Agustus	514.029.093	521.343.062	98,73	705.456.000	705.456.000	100
September	939.352.063	776.337.901	98,11	4.130.084.000	4.130.084.000	100
Oktober	827.939.704	883.122.435	99,22	1.925.319.000	1.925.319.000	100
November	1.049.946.782	1.102.158.956	99,96	11.618.098.000	11.618.098.000	100
Desember	882.341.461	844.559.031	99,58	1.915.194.000	1.915.194.000	100
Total	8.308.681.000	8.273.690.173	99,11	29.871.044.000	29.871.044.000	100

Penyerapan anggaran BPS Kota Palembang seiring dengan rencana penarikan dana. Pada tahun 2022 nilai konsistensi sebesar 100 persen, lebih baik daripada tahun 2021 sebesar 99,11 persen. BPS Kota Palembang telah berusaha untuk menyelaraskan antara rencana penarikan dana dan penyerapan anggaran. Terhadap anggaran yang tidak dapat diserap telah dilakukan revisi anggaran.




BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

BPS Kota Palembang sejalan dengan keinginan reformasi birokrasi telah berusaha untuk menghasilkan data yang terpercaya, beragam dan berkualitas. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap data BPS. Data dan informasi yang berkualitas sangat diperlukan karena merupakan rujukan bagi semua pihak dalam memformulasikan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi berbagai program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja BPS Kota Palembang menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan. Kesimpulan ini tercermin dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS Kota Palembang Tahun 2022. Selain itu, BPS Kota Palembang selama tahun 2022 mendapatkan penghargaan dari BPS sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal tersebut merupakan salah satu target program Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Rata-rata capaian kinerja BPS Kota Palembang menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai capaian kinerja sebesar 104,04 persen. Target dari sebagian besar tujuan dapat tercapai. Capaian tujuan pertama "Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan" yaitu sebesar 100 persen, tujuan kedua "Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN" yaitu 110 persen, tujuan ketiga "Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN" yaitu sebesar 108,33 persen. Sedangkan untuk tujuan keempat "Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi" pencapaiannya sebesar 99,97 persen karena tidak tercapainya target SAKIP 70.. Kendala yang dihadapi selama tahun 2022:

1. Kesulitan mengidentifikasi instansi mana saja yang pernah melakukan kegiatan statistik khusus dan sektoral


- 
2. Kesulitan dalam menjelaskan kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan statistik sektoral dan khusus kepada responden.
 3. Kurangnya pemahaman K/L/D/I tentang kaidah-kaidah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dan khusus dan pengajuan rekomendasi statistik.
 4. Dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi BPS Kota Palembang harus mampu meningkatkan seluruh sumber daya manusia yang unggul dan kompeten terutama dalam bidang SAKIP, karena SAKIP bukan hanya bidang subbagian Umum saja tetapi seluruh pegawai.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP BPS Kota Palembang berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dalam pengajuan rekomendasi statistik oleh dinas/instansi. Untuk maksud tersebut Sekretaris Daerah menghimbau seluruh dinas/instansi untuk:

1. Melaporkan dan meminta rekomendasi BPS setiap pelaksanaan survei statistik sektoral yang hasilnya dipublikasikan.
2. Melaporkan dan meminta rekomendasi BPS setiap kegiatan kompilasi produk administrasi yang hasilnya dipublikasikan.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan survei statistik sektoral yang hasilnya dipublikasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
4. Melaporkan hasil kegiatan kompilasi produk administrasi yang hasilnya dipublikasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Selain itu, BPS Kota juga tetap melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Palembang dalam hal pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan statistik tentang Satu Data Indonesia, Rekomendasi dan Kegiatan Metadata Statistik Sektoral dan Khusus. Dan dalam rangka penyusunan metadata statistik sektoral dan khusus, BPS Kota Palembang membentuk Tim percepatan pengumpulan metadata dan hasilnya data yang terkumpul jauh lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya.



Saran tindak lanjut yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja BPS Kota Palembang di periode selanjutnya adalah:

- a. Penyusunan jadwal kegiatan yang lebih sesuai dan wajar antara volume pekerjaan dengan waktu efektif penyelesaian pekerjaan oleh pegawai. Sehingga volume pekerjaan dapat lebih cepat diselesaikan dalam mekanisme kerja tim. Seluruh tim berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya.
- b. Secara rutin melakukan sosialisasi peraturan terkait Implementasi SAKIP dan Pelayanan Publik, sehingga dapat dipahami seluruh strategi dan rencana aksi yang akan dilakukan, agar dapat dilakukan segera pada tahun berjalan. Dengan melibatkan narasumber yang berasal dari instansi yang berwenang.
- c. Melakukan koordinasi dan sinergisitas yang solid bersama BPS Provinsi Sumatera Selatan, DJPB, DJA, Diskominfo, Bappeda, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, instansi pemerintah, akademisi, dan *stakeholder* lainnya agar dapat melakukan langkah nyata berkolaborasi mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN).
- d. Tetap menjalin komunikasi yang baik dengan pengguna data, melalui Pojok Statistik dan layanan publik lainnya, memberikan pelayanan prima atas kebutuhan data statistik yang berkualitas, terkini, dan akurat.
- e. Mengadakan FGD dan *indepth study* terkait berbagi pakai Satu Data bersama seluruh *stakeholder* terkait dan masyarakat secara luas.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Renstra BPS Kota Palembang 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	58,28	60,00	100	100	100	Seksi Sosial, Produksi, Distribusi, dan NAWAS, Bidang IPDS
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	3,85	4	100	100	100	Seksi Sosial, Produksi, Distribusi, dan NAWAS
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	33,33	33,33	41	53	61	Seksi Sosial, Produksi, Distribusi, dan NAWAS, Bidang IPDS
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	10	69,3	76	84	84	Seksi IPDS
3.	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	2,5	5	92	96	96	Seksi Sosial Produksi distribusi dan NAWAS IPDS
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	69	70	70	70	71	Seksi Sosial, Produksi, Distribusi, dan NAWAS, Bidang IPDS
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	80	100	100	99,6	99,7	Seksi IPDS

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Taupiq Hidayat Nr, M.M
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Zulkipli, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Ir. Zulkipli, M.Si
NIP. 19680703 199401 1 001

Palembang, 31 Januari 2022
Pihak Pertama

Ir. Taupiq Hidayat Nr, M.M
NIP. 19680412 199402 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	Persen	100
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	41
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	76
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	92
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	70
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	100



Program		Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp.	6.124.188.000,-
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp.	6.054.195.000,-
Jumlah	Rp.	12.178.383.000,-

Pihak Kedua



Ir. Zulkipli, M.Si
NIP. 196807031994011001

Palembang, 31 Januari 2022
Pihak Pertama



Ir. Taupiq Hidayat Nr. M.M
NIP. 196804121994021001

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) Suplemen 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (SUPLEMEN)
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Kinerja Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Kelembagaan	Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu	Persen	98
	Tersedianya Layanan Pojok Statistik	Unit	1
	Jumlah Desa Cinta Statistik (Cantik)	Desa	2
	Satker berpredikat WBK WBBM dari KemenPANRB	Satker	1
	Persentase Pelaporan Dokumen melalui SPI Online	Persen	100
	Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKPN/LHKASN	Persen	100
	Terselenggaranya Pengukuran Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Pemda	1

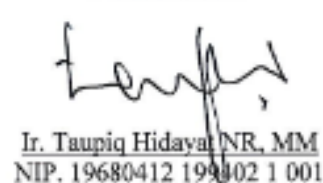
Palembang, 31 Januari 2022

Pihak Kedua



Dr. Ir. Zulkipri, M.Si
NIP. 19680703 199401 1 001

Pihak Pertama



Ir. Taupiq Hidayat, NR, MM
NIP. 19680412 199402 1 001

Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja BPS Kota Palembang 2022

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	PK								Capaian Kinerja							
		Target				Realisasi				Kumulatif			Terhadap target setahun				
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	TW IV	
PK dan IKU																	
T1	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan																
1.1.	Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas																
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan	Persen	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100	0	0	100	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi	Persen	16,67	50	50	100	16,67	50	50	100	100	100	100	16,67	50	50	100
T2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN																
2.1.	Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN																
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	0	0	0	41	0	8,33	8,33	50	0	0	0	0	20,32	20,32	120
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	0	0	0	76	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	100
T3	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN																
3.1	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I																
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	0	0	0	92	0	30,77	100	100	0	0	0	0	33,45	108,33	108,33
T4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi																
4.1	SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan																
	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Point	0	0	0	70	0	0	0	69,96	0	0	0	0	0	0	99,94
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100

Lampiran 5

**JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS KOTA PALEMBANG
MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2022**

No	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	BPS Kota Palembang	-	16	23	2	6	-	-	47

Lampiran 6. Kegiatan BPS Kota Palembang 2022

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
KEDEPUTIAN BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK													
	SURVEI KEBUTUHAN DATA (SKD)												
	UPDATING MFD ONLINE												
	METADATA STATISTIK KEGIATAN SEKTORAL												
KEDEPUTIAN BIDANG STATISTIK SOSIAL													
	SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) SEMESTERAN												
	SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) TAHUNAN												
	PENDATAAN <i>LONG FORM</i> SP2020												
	SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL KOR DAN KONSUMSI												
	SUSENAS KESEHATAN DAN PERUMAHAN												
	PENYUSUNAN STATISTIK POLITIK KEAMANAN												
	SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI												
	PENDATAAN AWAL REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK)												
KEDEPUTIAN BIDANG STATISTIK PRODUKSI													
	IBS TAHUNAN												
	IBS BULANAN												
	IMK TAHUNAN												
	IMK TRIWULANAN												
	SURVEI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGGALIAN, CAPTIVE POWER, DAN UPDATING DIREKTORI												
	SURVEI PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN RPH/TPH												
	SURVEI PERUSAHAAN PERIKANAN, TPI/PPI/PP												
	SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN												
	SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN/UBINAN												
	SURVEI HORTIKULTURA DAN INDIKATOR PERTANIAN												
	SURVEI PERUSAHAAN PERKEBUNAN												
	PENDATAAN STATISTIK PERTANIAN TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN METODE KERANGKA SAMPEL AREA												

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
	PEMUTAKHIRAN KERANGKA GEOSPASIAL DAN MUATAN WILKERSTAT ST2023												
	SURVEI PERUSAHAAN KONSTRUKSI												
	KEDEPUTIAN BIDANG STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA												
	INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI												
	KOMPILASI DATA TRANSPORTASI												
	SURVEI PERDAGANGAN ANTAR WILAYAH												
	SURVEI HARGA KONSUMEN												
	SURVEI VOLUME PENJUALAN ECERAN BERAS												
	SURVEI HARGA PRODUSEN												
	SURVEI HARGA PERDAGANGAN BESAR												
	SURVEI KARAKTERISTIK USAHA												
	SURVEI HARGA PROPERTI PERUMAHAN (SHPP)												
	SURVEI HARGA MESIN DAN PERALATAN (SHMP)												
	SURVEI POLA DISTRIBUSI												
	KEDEPUTIAN BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK												
	SKKRT												
	SKSPPI												
	SMAK												
	SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB												
	SKSJ TAHUNAN												
	SKNP TAHUNAN												
	SEEA TAHUNAN												
	PENGUMPULAN DATA DIREKTORI LNPRT												
	SURVEI KHUSUS LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA TAHUNAN												
	SKLNPRT TRIWULAN												
	SKTNP BARANG												
	SKTNP JASA												
	SKPS												

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
	SKSIP												
	SKTIR												
	PENGUMPULAN FENOMENA EKONOMI DARI SISI LAPANGAN USAHA												
	PENYUSUNAN PDRB TAHUNAN DAN TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010=100												
	PENYUSUNAN KONSOLIDASI PDRB PENGELUARAN TRIWULANAN DAN TAHUNAN												

Lampiran 7

RESPON RATE SURVEI BPS KOTA PALEMBANG 2022

No	Nama Survei	Target Sampel	Realisasi	Response Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Survei Kebutuhan Data	30	32	106,67
2	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	200	200	100
3	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan	800	800	100
4	Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor Dan Konsumsi	860	860	100
5	Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Kesehatan dan Perumahan	200	200	100
6	Penyusunan Statistik Politik Keamanan	1	1	100
7	Survei Perilaku Anti Korupsi	80	80	100
8	Pendataan <i>Long Form SP2020</i>	16.416	16.416	100
9	Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022	377.811	391595	103,6
10	Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan	144	144	100
11	Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan	84	60	71,43
12	VIMK Tahunan	419	419	100
13	VIMK Triwulanan	752	752	100
14	Survei Tahunan Perusahaan Pertambangan Non Migas	3	3	100
15	Survei Tahunan Perusahaan Listrik	2	2	100
16	Survei Tahunan Perusahaan Gas	2	2	100
17	Survei Triwulanan Perusahaan Air Bersih	12	12	100
18	Survei Captive Power	20	20	100
19	Survei Perusahaan Kontruksi Triwulanan	259	250	96,53
20	Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan	142	137	96,48
21	Survei Pencacahan RPH	4	4	100
22	Survei Perikanan	4	4	100
23	Survei Pertanian Terintegrasi	790	790	100
24	Survei KPPT	12	12	100
25	Survei Perusahaan Kehutanan Tahunan	13	13	100
26	Tanaman Pangan Ubinan	112	112	100
27	KSA Padi	2.700	2.700	100
28	KSA Jagung	192	192	100
29	Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023	4.124	4.124	100
	Survei Holtikultura dan Indikator Pertanian	918	918	100
30	SHK-1.1	1284	1284	100
31	SHK-1.2	936	936	100
32	SHK-2.1	1476	1476	100
33	SHK-2.2	1248	1248	100

34	SHK-3	3000	3000	100
35	SHK-4	720	720	100
36	SHK-5	360	360	100
37	SHK-6	312	312	100
38	Survei Harga Perdagangan Besar	1392	1392	100
39	Survei Harga Properti Perumahan (SHPP)	5	5	100
40	Survei Harga Mesin dan Peralatan (SHMP)	20	20	100
41	Survei Harga Produsen Sektor Jasa (HPJ)	180	180	100
42	Survei Harga Produsen (HP)	240	240	100
43	Survei Waktu Tunggu Dwelling Time di Pelabuhan	52	52	100
44	Survei AJR-II.2	1	1	100
45	Survei AJR-II.3	1	1	100
46	Survei PJ-2.5	1	1	100
47	Survei Simoppel	12	12	100
48	Survei Angkutan Udara (Bandara)	12	12	100
49	Survei Angkutan Penumpang Dan Barang Di Terminal Dan Jembatan Timbang	8	8	100
50	Survei Karakteristik Usaha (BCS)	67	67	100
51	SVK	50	50	100
52	SVEB	80	80	100
53	Survei Perdagangan Antar Wilayah (SPAW)	205	205	100
54	Survei Pola Distribusi Barang dan Jasa	23	23	100
55	VHT-S	1.272	1.272	100
56	BUMD	6	6	100
57	APBD	1	1	100
58	K2	1	1	100
59	SKTNP BARANG	24	24	100
60	SKTNP JASA	52	52	100
61	Pengumpulan Fenomena Ekonomi Dari Sisi Lapangan Usaha	4	4	100
62	SKSJ Tahunan	5	5	100
63	SKNP Tahunan	23	23	100
64	SEEA Tahunan	10	10	100
65	Snapshot Perekonomian	12	12	100
66	SKLNPRT Triwulanan	40	40	100
67	SKKRT	120	120	100
68	Pengumpulan Data Direktori LNPRT	10	10	100
69	Survei Penyusunan Disagregasi PMTB	6	6	100
70	SKLNP yang Melayani Rumah Tangga Tahunan	6	6	100
71	SMAK	25	25	100
72	SKSPPI	30	30	100
73	SKPS	8	8	100
74	SKSIP	1	1	100
75	SKTIR	10	10	100

Lampiran 8**Judul Publikasi ARC BPS Kota Palembang**

No.	Judul	Periode Terbit	Bahasa	Jadwal Rilis	Status
1	Kota Palembang Dalam Angka 2022	Tahunan	Indonesia dan Inggris	25 Feb. 2022	Rilis Tepat Waktu
2	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Menurut Lapangan Usaha 2017-2021	Tahunan	Indonesia dan Inggris	5 Apr. 2022	Rilis Tepat Waktu
3	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Menurut Pengeluaran 2017-2021	Tahunan	Indonesia	28 Apr. 2022	Rilis Tepat Waktu
4	Kecamatan Seberang Ulu I Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
5	Kecamatan Alang-alang Lebar Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
6	Kecamatan Kertapati Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
7	Kecamatan Plaju Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
8	Kecamatan Kalidoni Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
9	Kecamatan Gandus Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
10	Kecamatan Ilir Timur I Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
11	Kecamatan Bukit Kecil Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
12	Kecamatan Ilir Timur II Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
13	Kecamatan Sukarami Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
14	Kecamatan Sematang Borang Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
15	Kecamatan Ilir Barat II Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
16	Kecamatan Kemuning Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
17	Kecamatan Jakabaring Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
18	Kecamatan Sako Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
19	Kecamatan Ilir Barat I Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
20	Kecamatan Seberang Ulu II Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
21	Kecamatan Ilir Timur III Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept. 2022	Rilis Tepat Waktu
22	Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	28 Des. 2022	Rilis Tepat Waktu

Judul Publikasi Non ARC BPS Kota Palembang

No.	Judul	Jadwal Rilis	Status
1	Statistik Daerah Kota Palembang 2022	27 Sept. 2022	Rilis
2	Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Palembang 2022	12 Des. 2022	Rilis
3	Statistik Ketenagakerjaan Kota Palembang 2021	30 Des. 2022	Rilis
4	Indikator Kesejahteraan Kota Palembang Tahun 2022	30 Des. 2022	Rilis